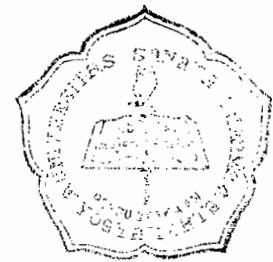


**PENERAPAN AKUNTANSI DANA DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELU**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh :

Wilprima Maria Fatima Seran

NIM : 972114034

NIRM : 970051121303120032

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2001

Skripsi
PENERAPAN AKUNTANSI DANA DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELU

Oleh :

Wilprima Maria Fatima Seran

NIM : 972114034

NIRM : 970051121303120032

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I

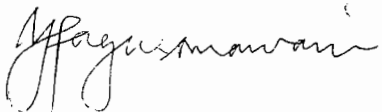
Tanggal : 31 Juli 2001



Drs. YP. Supardiyono, M.Si.,Akt.

Pembimbing II

Tanggal : 24 Agustus 2001



Dra. YF. Gien Agustinawansari, MM.,Akt.

Skripsi
PENERAPAN AKUNTANSI DANA DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELU

Dipersiapkan dan ditulis oleh :
Wilprima Maria Fatima Seran
NIM : 972114034
NIRM : 970051121303120032

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
Pada Tanggal 21 September 2001
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji


	Nama lengkap	Tanda tangan
Ketua	Drs. FA. Joko Siswanto, MM.,Akt.	
Sekretaris	Drs. YP. Supardiyono, M.Si.,Akt.	
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si.,Akt.	
Anggota	Dra. YF. Gien Agustinawansari, MM.,Akt.	
Anggota	Fr. Reni Retno Anggraeni, S.E., M.Si.,Akt.	

Yogyakarta, 29 September 2001

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma




Drs. H. Suseno TW., M.S.

PERSEMBAHAN

*"BETAPA HATI KUI BERTERIMA KASIH YESUS,
KAU MENGASIH KUI, KAU MEMILIKI KUI.
HANYA INI TUHAN PERSEMBAHANKU..."*

*Dengan penuh cinta kupersembahkan karya sederhana ini
untuk mereka yang selalu aku miliki:*

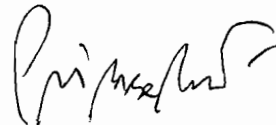
- ❖ Bapak Niko & Mama Beatrix*
- ❖ Mater, Gab, Ion, Ella dan Virgo*

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 21 September 2001

Penulis,



(Wilprima Maria Fatima Seran)

ABSTRAK
PENERAPAN AKUNTANSI DANA DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belu

Wilprima Maria Fatima Seran
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2001

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemungkinan diterapkannya akuntansi dana dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada pemerintah daerah Kabupaten Belu-Nusa Tenggara Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan ialah teknik analisis deskriptif, yaitu dengan membandingkan duabelas prinsip akuntansi dana dengan kondisi pemerintah daerah.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan ditemukan bahwa sembilan dari duabelas prinsip akuntansi dana yaitu Akuntansi dan Pelaporan, Sistem Akuntansi Dana, Jenis-jenis Dana, Akuntansi Aktiva Tetap dan Utang Jangka Panjang Umum, Penilaian Aktiva Tetap, Depresiasi Aktiva Tetap, Basis Akrua dalam Akuntansi Pemerintahan, Klasifikasi Akun Transfer, Pendapatan, Belanja dan Biaya, dan Laporan Keuangan Tahunan dan Interim belum memenuhi syarat dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Belu sehingga diperoleh kesimpulan bahwa akuntansi dana belum mungkin dapat diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu dalam pengelolaan keuangan daerahnya.

ABSTRACT
THE APPLICATION OF FUND ACCOUNTING ON THE DISTRICT
FINANCIAL MANAGEMENT
A Study Case at District Belu, Nusa Tenggara Timur

Wilprima Maria Fatima Seran
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2001

This research was aimed to find out the possibility of the application of fund accounting in the district financial management by the government of district Belu. The research was a case study at the district Belu-Nusa Tenggara Timur.

In order to collect the data, the writer employed the interview, documentation, and observation. The technique of data analysis used was descriptive, by comparing the twelve principles of fund accounting with the condition within the district government.

Based on the data analysis done by the research, it was found out that the nine principles above - Accounting and Reporting, Fund Accounting System, Types of Fund, Fixed Asset Accounting and Long Term Liabilities, Fixed Asset Measurement, Fixed Asset Depreciation, Accrual Basis in Governmental Accounting, Classification of Account Transference, Revenue, Expenses, and Costs and Annual Financial Statement and Interim - were not yet qualified to be applied in the district financial management. Therefore, the research concluded that the fund accounting was still not possible to be applied by the district government of Belu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan atas karunia-Nya yang begitu besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Penerapan Akuntansi Dana dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Pada kesempatan ini dengan segala hormat dan cinta penulis haturkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga selesainya skripsi ini:

1. Drs. Hg. Suseno TW, M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Drs. YP. Supardiyono, M.Si.,Akt., selaku ketua jurusan Akuntansi dan sebagai pembimbing I yang telah membimbing, memberi pengarahan, koreksi dan saran-saran selama penulisan skripsi ini.
3. Dra. YF. Gien Agustinawansari, MM.,Akt., selaku pembimbing II yang telah membimbing, memberi pengarahan koreksi dan saran-saran selama penulisan skripsi ini.
4. Drs. Ign. Kuntoro .M, Akt., yang telah memberi masukan, koreksi dan saran-saran yang berguna.
5. Drs. Marianus M. Modesir, MM., dan keluarga yang selalu memberi dukungan.

6. Para dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi yang telah mendidik dan membantu penulis selama ini.
7. Bupati beserta jajaran Pemda Kabupaten Belu yang berkenan memberi ijin untuk melakukan penelitian dan memberikan data-data yang dibutuhkan.
8. Bapak, Mama, Adik-adik, dan keluarga besar di Timor yang selalu mendoakan dan merindukan saya.
9. Crew Kutilang 13 yang menjadi bagian saya selama ini: eyang Utti, mas Manda-mbak Lina + Adit&Dini, Ruri, Mar, Tika, Ida....I'm gonna miss you !!
10. Ebid & Pierre, Nona-Xandra&Anna, Yafe, Winda, Emmy.....thank's untuk segalanya.
11. Teman-teman Akt-A'97 terutama Imma, Eddo, Teguh, Yana, Bambang, Andi, Asthi juga teman-teman KKN-Plaosan yang selalu peduli.
12. Saudara-saudara saya yang ada di Jogja: Tanti, Giyen, Waldus, Ullu, Adi, Toni, Adel, Nyongki, dan Efrem... thank you!!!
13. My big brother "Lans" thank's untuk segalanya....if I know what love is, it is because of you.

Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk itu segala kritik dan saran sangat diperlukan.

Yogyakarta, 21 September 2001

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II. LANDASAN TEORI	9
A. Akuntansi Pemerintahan	9
1. Pengertian Akuntansi Pemerintahan	9
2. Kekhususan Akuntansi Pemerintahan	9
B. Akuntansi Dana	13
1. Pengertian	13
2. Konsep dan Istilah	14
3. Persamaan Akuntansi Dana	15
4. Prinsip-prinsip Akuntansi Dana	19
5. Peranan Anggaran	26

C. Keuangan Daerah	28
1. Pengertian	28
2. Sumber Keuangan Pemerintah Daerah	28
3. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	30
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Subjek dan Objek Penelitian	33
C. Tempat dan Waktu Penelitian	34
D. Data yang Dicari	34
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	35
BAB IV. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DAERAH	37
A. Keadaan Geografis	37
B. Keadaan Penduduk	38
C. Pemerintahan	38
D. Sosial	39
1. Pendidikan	39
2. Kesehatan	40
3. Agama dan Sosial Lainnya	41
E. Sumber Daya Alam	41
F. Keadaan Keuangan Daerah	42
BAB V. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	44
A. Deskripsi Data	44
B. Pembahasan dan Analisis Data	49
C. Perbandingan Antara Prinsip GASB dan Pemerintah Daerah	63

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Keterbatasan Penelitian	68
C. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

I. Neraca	17
II. Laporan Pendapatan dan Belanja Daerah	18
III. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	19
IV. Keadaan Penduduk Kabupaten Belu	38
V. Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Belu	45
VI. Prioritas Pemanfaatan Dana Kabupaten Belu	48
VII. Rekapitulasi Usulan Proyek Menurut Sumber Dana	48
VIII. Realisasi Fisik Keuangan Proyek	49
IX. Perbandingan antara Prinsip-prinsip GASB dengan Kondisi Pemerintah Daerah	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara dengan wilayah yang luas membutuhkan suatu sistem pemerintahan daerah yang efektif. Sistem ini diperlukan tidak saja sebagai alat untuk melaksanakan berbagai program pemerintah, tetapi lebih penting agar masyarakat setempat dapat berperan serta dalam menentukan prioritas untuk pembangunan daerahnya sendiri. Agar dapat menjalankan semua tugas-tugasnya pemerintah daerah membutuhkan dana. Sebab pada satu sisi lembaga pemerintahan melakukan berbagai bentuk pengeluaran guna membiayai aktivitas-aktivitasnya, dan pada sisi lain pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan guna menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan. Sehingga dalam mengelola keuangannya pemerintah daerah harus mampu menentukan penggunaan anggaran secara tepat dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluarannya.

Menghadapi perkembangan zaman dan tantangan persaingan global, otonomi daerah dipandang perlu untuk diselenggarakan dengan memberikan kewenangan yang luas, untuk mengatur dan memanfaatkan potensi daerah yang ada serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan. Otonomi daerah bukan hanya sekedar pemberian wewenang luas kepada pemerintah daerah, tetapi akan lebih berarti bagi rakyat daerah jika otonomi disertai dengan pertanggungjawaban yang transparan secara material dan moral kepada

rakyat daerah. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan, yang berarti daerah membutuhkan dana atau uang dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya (Riwu Kaho,1997:124). Tanpa adanya biaya yang cukup tidak mungkin bagi daerah untuk dapat menyelenggarakan tugas, kewajiban serta kewenangan yang ada padanya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya. Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai, dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula.

Seperti halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mencatat semua transaksi keuangan. Era globalisasi dan otonomi daerah dengan proses desentralisasinya menuntut adanya akuntabilitas publik dalam melaksanakan setiap aktivitas. Dalam setiap pelaksanaan aktivitas yang diharapkan adalah ekonimisasi, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemerintah (Rasuli,2000). Ketiga dimensi ini belum dapat dilihat dari laporan pertanggungjawaban pemerintah yang sekarang ini yaitu Perhitungan Anggaran Negara (PAN). Di Indonesia, pembukuan pada dasarnya bersifat tidak berpasangan (*single entry*), dan pembukuannya berdasarkan atas dasar kas (*cash basis*). Padahal pembukuan tunggal hanya melakukan pencatatan transaksi dari satu sisi saja. Sementara itu pembukuan berdasarkan kas hanya melakukan pencatatan terhadap keluar masuknya kas. Jadi apa yang diterima melalui kas dianggap sebagai pendapatan, demikian juga pengeluaran melalui kas dianggap sebagai

pengeluaran periode itu. Dasar pelaporan keuangan Indonesia adalah Undang-Undang PAN (Perhitungan Anggaran Negara). Laporan keuangan pemerintah Indonesia terdiri atas laporan penyebutan total realisasi pendapatan, belanja, saldo lebih atau kurang dari anggaran.

Organisasi pemerintahan (*governmental organization*) merupakan salah satu bentuk dari berbagai bentuk organisasi nirlaba yang umumnya dibentuk untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Bidang yang dikelola organisasi pemerintahan umumnya berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa yang vital bagi masyarakat atau secara komersial tidak ekonomis apabila dikelola organisasi komersial. Mengingat betapa pentingnya organisasi nirlaba khususnya organisasi pemerintahan yang banyak bergerak dalam aktivitas layanan umum, perlu dibentuk akuntansi tersendiri sebagai *service activity* untuk menyediakan informasi dalam rangka pengelolaan keuangan pemerintah (Baldrick&Bonni,1999:1-2).

Kualitas informasi ditentukan oleh tingkat relevansi, ketepatan waktu, kelengkapan, dan dapat dipercayanya suatu informasi. Akuntansi pemerintahan harus dapat memberi informasi yang berguna bagi perencanaan, penganggaran, pengendalian anggaran dan perumusan kebijakan serta penilaian kinerja suatu unit instansi pemerintah. Pemerintah yang demokratis bertanggungjawab untuk beroperasi dengan efisien, hemat, dan efektif untuk tujuan yang dikehendaki rakyatnya. Informasi atas laporan keuangan dibutuhkan oleh masyarakat untuk melihat perkembangan

pembangunan daerahnya. Dengan demikian keberhasilan ataupun kegagalan mengelola suatu daerah dapat diketahui.

Karakteristik dan lingkungan organisasi pemerintahan yang berbeda dengan organisasi komersial maupun kepatuhan terhadap undang-undang, dan peraturan lainnya yang harus dapat ditunjukkan dalam laporan keuangan organisasi pemerintahan, menyebabkan perlu diformulasikan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan tersendiri. Memahami sifat dan hakikat pemerintah serta lingkungan operasinya yang kompleks merupakan hal penting untuk dapat menetapkan obyektif laporan keuangan pemerintah. Pemerintahan daerah di Indonesia bersifat berjenjang, berbeda dengan negara Amerika Serikat di mana tiap-tiap negara bagian bebas dan berdiri sendiri sehingga pemerintah wilayah dan pemerintah daerah jelas berada di bawah pemerintah pusat.

Governmental Accounting Standards Board (GASB), sebuah organisasi profesi akuntansi yang ada di Amerika Serikat, memformulasikan standar akuntansi dan pelaporan untuk organisasi pemerintah. GASB telah memformulasikan prinsip akuntansi pemerintahan yang disebut juga prinsip akuntansi dana, dimana sistem akuntansi pemerintahan ditentukan berdasarkan pembentukan dana-dana. Akuntansi pemerintahan di Amerika ini menggunakan sistem pencatatan *double entry* (sistem berpasangan) dan dasar waktu yang di modifikasi (*modified accrual basis*).

GASB menetapkan bahwa tujuan pelaporan keuangan akuntansi pemerintahan (dana) adalah untuk menunjukkan kondisi keuangan, hasil

operasi, perubahan kondisi keuangan dan untuk menunjukkan kesesuaian pelaksanaan aktivitas dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang telah ditetapkan. Undang-undang ditetapkan untuk mengatur bagaimana pendapatan-pendapatan unit pemerintahan dapat diperoleh, dan bagaimana mengalokasikan pendapatan-pendapatan tersebut pada berbagai kegiatan pemerintahan. Demikian juga standar-standar dan prosedur untuk penanganan penerimaan-penerimaan dan pengeluaran, perlakuan akuntansinya, serta pelaporannya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pembatasan-pembatasannya. Oleh karena itu taat kepada ketentuan hukum adalah lebih utama, dimana apabila terdapat perbedaan dengan prinsip akuntansi, ketentuan hukum lebih diutamakan (Rosjidi,1987:2).

✓ Masalah pengelolaan keuangan daerah merupakan masalah penting dalam otonomi daerah terutama sanggup atau tidaknya sumber daya manusia yang ada untuk mengelola keuangan daerah secara efisien dan efektif. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu memiliki kecakapan mengelola keuangannya baik penerimaannya maupun pengeluarannya karena kompleksitas kegiatan yang semakin meningkat tentu saja memerlukan pencatatan transaksi yang semakin kompleks pula yang secara langsung akan mempengaruhi saldo dana dalam rekening maupun dalam aktivitas pencatatannya. Untuk itu diperlukan adanya sarana pencatatan yang lengkap dan rinci. Pencatatan yang lengkap dan rinci dapat membantu dalam melakukan analisis terhadap perubahan saldo dana, pelaksanaan

anggaran serta pelaporan realisasinya, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

B. Permasalahan

Apakah akuntansi dana memungkinkan untuk diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemungkinan diterapkannya akuntansi dana dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Belu.

D. Manfaat Penelitian

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Belu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu dalam mengelola keuangan daerahnya.

2. Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka dan mudah-mudahan dapat memberi tambahan informasi bagi para pembaca khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan.

3. Penulis

Penelitian ini mendorong penulis untuk mencoba mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh dengan praktek dilapangan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menguraikan tentang jenis penelitian yang digunakan, waktu dan tempat penelitian, objek dan subjek penelitian, data yang dicari, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DAERAH

Menguraikan tentang pemerintah daerah Kabupaten Belu secara umum.

BAB V PEMBAHASAN

Menguraikan tentang hasil analisis data yang diperoleh untuk membahas permasalahan yang ada.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Menguraikan tentang ringkasan hasil penelitian yang berupa kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akuntansi Pemerintahan

1. Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan (*governmental accounting*) berkaitan dengan proses pengolahan data akuntansi bagi organisasi pemerintahan yang tidak bertujuan untuk menghasilkan laba. Walaupun sifat lembaga pemerintah berbeda dengan lembaga-lembaga lain terutama yang bertujuan mencari laba, namun kegiatan akuntansi pemerintahan meliputi kegiatan penganalisaan, pencatatan, penyimpulan, pelaporan, dan penginterpretasian transaksi-transaksi unit dan agensi pemerintahan. Lembaga pemerintahan senantiasa berukuran besar namun lembaga pemerintahan tergolong lembaga mikro, sehingga akuntansi pemerintahan digolongkan sebagai akuntansi mikro.

Oleh karena itu akuntansi pemerintahan dapat diartikan sebagai akuntansi mikro yang berfungsi khusus menyajikan informasi keuangan bagi lembaga pemerintahan. Informasi keuangan dibutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menjalankan aktivitasnya.

2. Kekhususan Akuntansi Pemerintahan

Berbagai prinsip akuntansi, terminologi dan bentuk pelaporan antara akuntansi komersial yang bermotifkan laba digunakan juga dalam akuntansi pemerintahan. Namun secara fundamental pencatatan dan pelaporan

akuntansi komersial berbeda dengan akuntansi pemerintahan, karena adanya kondisi operasi dan tujuan kegiatan yang bersifat khusus.

Perbedaan kondisi yang ada pada akuntansi pemerintahan antara lain (Kustadi, 1986:15) :

- 1) Tidak diperlukannya pencatatan laba dan rugi kecuali pada unit perusahaan.
- 2) Tidak diperlukannya pencatatan kepemilikan pribadi (*individual ownership*).
- 3) Pencatatan tersendiri harus ada buat dana (*fund*) yang sebaiknya merupakan satuan keuangan dan pembukuan lengkap.
- 4) Pembukuan harus disediakan juga buat keperluan pengawasan anggaran.

Partono (2000) seorang pemerhati masalah akuntansi pemerintahan mengemukakan bahwa standar akuntansi pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pengembangan akuntansi pemerintahan dan perlu disusun dan dikembangkan secara terus-menerus. Akuntansi pemerintahan telah menunjukkan “jati dirinya” sebagai disiplin akuntansi yang terpisah dari cabang-cabang akuntansi yang lain. Hal tersebut dapat dipahami mengingat lingkungan pemerintahan menunjukkan aspek-aspek yang sangat berbeda dengan lingkungan swasta/komersial dan dengan sendirinya memerlukan dalam banyak hal standar-standar akuntansi yang berbeda dengan yang berlaku di sektor swasta. Oleh karena itu akuntansi pemerintahan sering dianggap sebagai bidang akuntansi yang berdiri sendiri.

Sistem pemerintahan Indonesia yang bersifat sentralisasi, menyebabkan timbulnya sifat sentralisasi dalam sistem akuntansi pemerintahan Indonesia, sehingga akuntansi pemerintahan di Indonesia terutama adalah akuntansi pemerintahan pusat (Baswir, 1993:8). Sistem akuntansi pemerintahan yang merupakan sistem yang terpadu disebut Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari dua sistem utama yaitu :

- A. Sistem Akuntansi Pusat (SAP) yang diselenggarakan oleh Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN), Departemen Keuangan, yang akan menghasilkan informasi-informasi dan laporan-laporan keuangan pemerintah pusat.
- B. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara, departemen dan lembaga nondepartemen yang akan menghasilkan informasi dan laporan keuangan lembaga/departemen.

Pemerintah pusat Indonesia kini telah memiliki secara substansial sistem, prosedur, serta teknik pencatatan untuk sistem akuntansinya, walaupun beberapa penyempurnaan masih perlu dilakukan. Akuntansi pemerintahan Indonesia menggunakan pembukuan tunggal (*single entry bookkeeping*) dan pembukuannya berdasarkan dasar kas (*cash basis*). Pembukuan tunggal hanya melakukan pencatatan transaksi dari satu sisi saja. Misalnya, bila suatu instansi pemerintahan melakukan pembelian kendaraan maka pencatatan dilakukan di satu sisi biaya pengeluaran untuk pembelian kendaraan. Aktiva berupa mobil selanjutnya hanya dicatat dibuku tambahan

ekstrakomptabel sebagai pelengkap. Sementara itu pembukuan berdasarkan kas hanya melakukan pencatatan terhadap keluar-masuknya kas. Jadi apa yang diterima melalui kas dianggap sebagai pendapatan, demikian juga pengeluaran melalui kas dianggap sebagai pengeluaran periode itu. Atas dasar penerimaan dan pengeluaran kas dari setiap departemen atau non departemen disusun Sumbangan Perhitungan Anggaran (SPA). Kemudian SPA-SPA menjadi dasar untuk penyusunan Perhitungan Anggaran Negara (PAN).

Dasar pelaporan keuangan di Indonesia adalah Undang-Undang Perhitungan Anggaran Negara yang memuat dua pasal. Laporan keuangan pemerintah Indonesia terdiri atas laporan penyebutan total realisasi pendapatan, belanja, saldo lebih atau kurang dari anggaran, sedangkan rinciannya ada pada lampiran undang-undang tersebut. Rincian tersebut memuat berbagai hal yakni perhitungan anggaran gabungan, perhitungan anggaran pendapatan rutin, anggaran pendapatan pembangunan, belanja rutin, belanja pembaagunan tanpa bantuan proyek/teknis dan anggaran negara bantuan proyek. Semua lampiran yang terdiri dari angka-angka disertai penjelasannya terikat dalam nota PAN. Dari nota tersebut diketahui berapa selisih yang ada dari realisasi anggaran dalam satu tahun (Harry,2000).

B. Akuntansi Dana

1. Pengertian

Akuntansi pemerintahan yang menggunakan sistem dana disebut juga akuntansi dana (*fund accounting*). Sistem akuntansi pemerintahan harus diorganisasikan dan dioperasikan atas dasar dana. Dana dalam akuntansi pemerintahan bukan merupakan jumlah aktiva yang disisihkan untuk tujuan tertentu, melainkan merupakan kesatuan akuntansi dan fiskal yang memiliki seperangkat akun (*account*) yang berimbang sendiri untuk mencatat kas dan sumber keuangan lain, bersama-sama dengan utang dan saldo ekuitas, serta perubahan-perubahan yang terjadi untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan dan batasan-batasan lain. Dana dibentuk untuk mengendalikan sumber keuangan yang terbatas dan tertentu untuk menjamin dan menentukan kesesuaiannya dengan batasan hukum dan administrasi.

Dana disebut kesatuan fiskal (*fiscal entity*) karena dana memiliki sumber keuangan dan penggunaannya yang telah ditentukan dalam anggaran, dan dana disebut kesatuan akuntansi (*accounting entity*) karena dana memiliki persamaan akuntansi. Kesatuan akuntansi dana merupakan kesatuan akuntansi ganda (*multiple accounting entity*). Ada dua jenis kesatuan akuntansi dana yang digunakan organisasi pemerintahan yaitu Dana Belanja dan Dana Nonbelanja. Dana belanja atau pemerintahan digunakan untuk mempertanggungjawabkan aktifitas belanja yaitu aktiva lancar, utang lancar, perubahan keduanya, dan saldo dana. Dalam dana ini tidak terdapat

aktiva tetap dan utang jangka panjang. Sedangkan dana nonbelanja atau dana kepemilikan digunakan untuk mempertanggungjawabkan aktivitas nonbelanja, karenanya semua aktiva dan utang, perubahan keduanya dan saldo dana dipertanggungjawabkan dalam dana ini.

2. Konsep dan Istilah

Terdapat beberapa konsep dengan istilah yang sama antara akuntansi pemerintahan dengan sistem dana dan akuntansi komersial. Dalam akuntansi komersial dikenal konsep-konsep seperti kesatuan akuntansi (*accounting entity*), konsep penandingan pendapatan dengan biaya (*matching concept*), periodisasi (*periodicity*), dan kelangsungan hidup (*going concern*). Konsep-konsep ini juga terdapat dalam akuntansi dana, namun maknanya berbeda antara akuntansi dana dengan akuntansi komersial.

Konsep kesatuan akuntansi dalam akuntansi dana bermaksud bahwa setiap dana merupakan satu kesatuan dana yang saling terpisah antara satu dana dengan lain. Konsep penandingan pendapatan dan biaya bermaksud bahwa pendapatan (*revenue*) suatu periode anggaran tertentu dibandingkan dengan belanja (*expenditure*) periode anggaran tersebut untuk menentukan perubahan saldo dana. Selain menandingkan pendapatan dengan belanja, konsep ini juga berkaitan dengan penandingan anggaran dengan realisasinya untuk menentukan apakah aktivitas dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang tercermin dalam anggaran. Dalam akuntansi dana, konsep periodisasi

hanya relevan untuk dana yang bersifat nonbelanja demikian juga konsep kelangsungan hidup hanya relevan untuk dana yang bersifat nonbelanja (Baldrick&Bonni,1999:11-12).

3. Persamaan Akuntansi Dana

Pengertian akun (*account*) dalam akuntansi dana adalah judul suatu catatan akuntansi yang umumnya berbentuk T, yang dibagi menjadi dua bagian, sebelah kiri disebut Debit dan sebelah kanan disebut Kredit, sebagai alat untuk mengklasifikasi dan mencatat transaksi berdasarkan prinsip tata buku berpasangan, yang kemudian disebut dengan istilah rekening. Suatu transaksi adalah suatu kejadian ekonomi yang mempengaruhi aktiva dan modal suatu dana. Oleh karena itu harus dilakukan pencatatan karena adanya perubahan dalam persamaan akuntansinya. Persamaan akuntansi setiap dana dan kelompok akun (Baldrick&Bonni,1999:27) adalah sebagai berikut :

- 1) Persamaan akuntansi kelompok dana pemerintahan: **Aktiva Lancar = Utang Lancar + Saldo Dana.**
- 2) Persamaan akuntansi kelompok akun aktiva tetap umum: **Aktiva Tetap Umum = Investasi dalam Aktiva Tetap Umum.**
- 3) Persamaan akuntansi kelompok akun utang jangka panjang umum: **Jumlah yang harus disediakan dalam Dana Pelunasan Utang = Utang Jangka Panjang Umum.**

- 4) Persamaan akuntansi kelompok dana kepemilikan: **Aktiva = Utang + Modal.**
- 5) Persamaan akuntansi kelompok dana kepercayaan:
- (a) Dana Trust Belanja: **Aktiva Lancar = Utang Lancar + Saldo Dana.**
 - (b) Dana Trust Nonbelanja: **Aktiva = Utang + Saldo Dana.**
 - (c) Dana Trust Pensiun: **Aktiva = Utang + Saldo Dana.**
 - (d) Dana Peragenan: **Aktiva = Utang.**

Secara berurutan siklus akuntansi pemerintahan (dana) sebagai berikut :

1. Mencatat anggaran dalam catatan akuntansi
2. Mencatat transaksi yang terjadi periode tertentu
3. Membuat jurnal penutup
4. Menyiapkan laporan keuangan yang meliputi:
 - (a) Neraca
 - (b) Laporan pendapatan, belanja dan perubahan saldo dana
 - (c) Laporan arus kas (hanya untuk dana kepemilikan dan sejenisnya)
 - (d) Laporan perbandingan antara anggaran dan realisasinya (untuk jenis dana pemerintahan tertentu)

Contoh laporan-laporan keuangan:

Tabel I : Neraca

Pemerintah Kota "A" Dana Umum Neraca 31 Desember 2000		
Aktiva		
Kas		Rp xxxx
Piutang pajak properti-kadaluarsa	Rp xxx	
Cadangan pajak properti tidak tertagih	<u>xxx</u>	xxxx
Piutang bunga dan denda		xxxx
Supplies di tangan		<u>xxxx</u>
		Rpxxxx
Utang dan Saldo Dana		
Utang voucher		Rp xxxx
Utang ke dana pendapatan khusus		xxxx
Utang ke dana pelunasan utang		xxxx
Cadangan supplies di tangan		xxxx
Cadangan <i>encumbrance</i>		xxxx
Saldo dana tidak dicadangkan		<u>xxxx</u>
		Rp xxxx

Sumber: Baldrick & Bonni, 1999: 120

Tabel II: Laporan Pendapatan, Belanja, dan Perubahan Saldo Dana

Pemerintah Kota "A" Dana Umum Laporan Pendapatan, Belanja, dan Perubahan Saldo Dana Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2000		
Pendapatan		
Pajak properti	Rp xxxx	
Investasi	xxxx	
Bunga dan denda	xxxx	
Pajak penghasilan	xxxx	
Penjualan aktiva tetap umum	<u>xxxx</u>	
		Rp xxxx
Belanja		
Gaji	Rp xxxx	
Supplies	xxxx	
Peralatan	<u>xxxx</u>	
		<u>xxxx</u>
Selisih lebih (kurang) antara pendapatan dan belanja		Rp (xxxx)
Sumber (penggunaan) keuangan lain		
Hasil penj. Obligasi	xxxx	
Transfer operasi kpd dana pendpt khusus	xxxx	
Transfer operasi kpd dana pelunasan utang	<u>xxxx</u>	
		<u>xxxx</u>
Selisih lebih (kurang) pendpt dan sumber keuangan Lain dengan belanja dan penggunaan lain		Rp xxxx
Saldo dana di cadangkan (tidak dicadangkan) awal tahun		xxxx
		Rp <u>xxxx</u>
Kenaikan cadangan supplies ditangan		<u>xxxx</u>
Saldo dana dicadangkan dan tidak dicadangkan akhir tahun		Rp xxxx

Sumber : Baldrick & Bonni, 1999: 119

Tabel III: Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja

Pemerintah Kota "A" Dana Umum Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2000	
Taksiran Pendapatan	
Pajak	Rp xxxx
Perijinan	xxxx
Interpemerintah	xxxx
Beban jasa	xxxx
Denda dan penyitaan	xxxx
	Rp xxxx
Appropriasi	
Pemerintah umum	Rp xxxx
Keamanan rakyat	xxxx
Jalan raya	xxxx
Sanitasi dan kesehatan	xxxx
Pendidikan dan kebudayaan	xxxx
	Rp xxxx

Sumber : Baldrick & Bonni, 1999:62

4. Prinsip-Prinsip Akuntansi Dana

Kesatuan akuntansi dana dibedakan menjadi kelompok dana dan kelompok nondana (kelompok akun). Kelompok dana terdiri atas Kelompok Dana Pemerintahan, Kelompok Dana Kepemilikan, dan Kelompok Dana Kepercayaan. Kelompok nondana (kelompok akun) terdiri atas kelompok akun Aktiva Tetap Umum, dan kelompok akun Utang Jangka Panjang Umum.

GASB telah mengeluarkan 12 prinsip akuntansi pemerintahan yang dibagi dalam tujuh kelompok yaitu (1) *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) dan aturan hukum, (2) akuntansi dana, (3) aktiva tetap dan utang jangka panjang, (4) basis akuntansi, (5) Anggaran dan akuntansi

anggaran, (6) klasifikasi dan istilah, (7) laporan keuangan (Baldrick&Bonni,1999:23). Ketujuh kelompok prinsip ini dirinci menjadi 12 prinsip akuntansi pemerintahan, antara lain :

1) Akuntansi dan pelaporan

Sistem akuntansi pemerintahan harus memungkinkan (a) laporan keuangan disajikan secara wajar dan dengan pengungkapan penuh tentang posisi keuangan dan hasil operasi dana dan kelompok akun unit pemerintahan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum, dan (b) dapat menentukan dan menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan hukum dan kontraktual.

2) Sistem akuntansi dana

Sistem akuntansi pemerintahan harus diorganisasikan dan dioperasikan atas dasar dana. Dana didefinisikan sebagai kesatuan fiskal dan akuntansi dengan seperangkat akun yang berimbang dengan sendirinya untuk mencatat kas dan sumber keuangan lain bersama-sama dengan utang yang terkait dan saldo dana atau modal yang masih tersisa sesuai dengan peraturan, restriksi, dan batasannya.

3) Jenis-jenis dana

Jenis-jenis dana yang harus digunakan oleh suatu unit pemerintahan yaitu:

A. Dana Pemerintahan

- (a) Dana Umum (*general fund*) yaitu dana untuk mempertanggungjawabkan sumber-sumber yang tidak dipertanggungjawabkan dalam dana lain.
- (b) Dana Pendapatan Khusus (*special revenue fund*) yaitu dana untuk mempertanggungjawabkan penerimaan sumber-sumber tertentu (selain yang dipertanggungjawabkan dalam dana trust belanja dan proyek modal) yang ditunjukkan untuk aktivitas tertentu.
- (c) Dana Proyek Modal (*capital project fund*) yaitu dana untuk mempertanggungjawabkan penerimaan sumber-sumber tertentu yang digunakan untuk tujuan pemerolehan atau pembangunan fasilitas modal (selain yang dipertanggungjawabkan oleh dana kepemilikan dan dana trust).
- (d) Dana Pelunasan Utang (*debt service fund*) yaitu dana untuk mempertanggungjawabkan pengakumulasian sumber-sumber untuk membayar pokok dan bunga utang jangka panjang umum.

B. Dana Kepemilikan

- (a) Dana Perusahaan (*enterprise fund*) yaitu dana untuk mempertanggungjawabkan aktivitas bisnis (komersial) yang dilakukan oleh pemerintah.

- (b) Dana Layanan Internal (*internal service fund*) yaitu dana untuk mempertanggungjawabkan barang dan jasa yang disediakan oleh suatu unit pemerintah kepada unit pemerintah itu sendiri atau unit pemerintah lain.

C. Dana Kepercayaan

- (a) Dana Trust (*trust fund*) yaitu dan untuk mempertanggungjawabkan aktiva milik pihak lain yang dikelola pemerintah sebagai pihak yang dipercaya. Dana ini meliputi Dana Trust Belanja, Dana Trust Nonbelanja, dan Dana Trust Pensiun.
- (b) Dana Peragenan (*agency fund*) yaitu dana untuk mempertanggungjawabkan aktiva milik pihak lain yang dikelola oleh pemerintah yang bertindak sebagai agent.

4) Jumlah dana

Unit-unit pemerintahan harus menetapkan dan memelihara dana-dana yang dibutuhkan sesuai dengan aturan hukum dan administrasi. Dana yang tidak diperlukan dapat menunjukkan ketidakfleksibelan, terlalu kompleks, dan administrasi keuangan yang tidak efisien.

5) Akuntansi aktiva tetap dan utang jangka panjang umum

Pembedaan yang jelas harus dilakukan antara (a) aktiva tetap dan utang jangka panjang umum, dan (b) aktiva tetap dan utang jangka panjang dana:

- a) Aktiva tetap dana kepercayaan tertentu atau dana trust harus dipertanggungjawabkan melalui dana tersebut. Semua aktiva tetap lain dari suatu unit pemerintah harus dipertanggungjawabkan melalui Kelompok Akun Aktiva Tetap Umum.
- b) Utang jangka panjang dana kepercayaan tertentu atau dana trust harus dipertanggungjawabkan melalui dana tersebut. Semua utang jangka panjang lain dari suatu unit pemerintah harus dipertanggungjawabkan melalui Kelompok Akun utang Jangka Panjang Umum.

6) Penilaian aktiva tetap

Aktiva tetap harus dinilai berdasarkan kos, atau jika kos tidak dapat ditentukan, penilaian aktiva tetap berdasarkan taksiran kos. Aktiva tetap donasi harus dicatat sebesar taksiran harga pasar pada saat diterima.

7) Depresiasi aktiva tetap

- a) Depresiasi aktiva tetap umum tidak harus dicatat dalam akun dana pemerintahan. Depresiasi aktiva tetap umum dapat dicatat untuk tujuan analisis biaya; dan akumulasi depresiasi dapat dicatat dalam Kelompok Akun Aktiva Tetap Umum.
- b) Depresiasi aktiva tetap dana tertentu yang dipertanggungjawabkan dalam dana kepercayaan harus dicatat dalam dana tersebut. Depresiasi juga dicatat dalam dana kepercayaan dimana biaya, laba, dan atau mempertahankan modal diukur.

8) Basis akrual dalam akuntansi pemerintahan

Dasar akuntansi digunakan dalam akuntansi dana untuk mengukur posisi keuangan dan hasil operasi :

- a) **Dana pemerintahan.** Pendapatan dan belanja harus diakui dengan basis akrual modifikasian. Pendapatan diakui pada periode akuntansi dimana pendapatan terukur dan tersedia. Belanja harus diakui dalam periode akuntansi dimana utang terjadi, kecuali utang jangka panjang dan bunga yang belum jatuh tempo harus diakui pada saat jatuh tempo.
- b) **Dana kepemilikan.** Pendapatan dan biaya harus diakui dengan basis akrual. Pendapatan diakui pada periode dimana terhimpun (*earned*). Biaya harus diakui pada periode dimana terjadi (digunakan untuk memperoleh pendapatan).
- c) **Dana kepercayaan.** Pendapatan dan biaya atau belanja diakui dengan basis sesuai dengan tujuan pengukuran akuntansinya. Dana Trust Nonbelanja dan Dana Pensiun menggunakan basis akrual. Aktiva dan utang Dana Peragenan diakui dengan basis akrual modifikasian.
- d) **Transfer** harus diakui pada periode akuntansi dimana utang piutang antardana timbul.

9) Penganggaran, pengendalian melalui anggaran, dan pelaporan anggaran

- a) Setiap unit pemerintah harus menggunakan anggaran tahunan



- b) Sistem akuntansi harus menyediakan dasar untuk pengendalian melalui anggaran
- c) Perbandingan anggaran harus dilakukan dalam laporan keuangan dana pemerintahan yang telah menggunakan anggaran tahunan

10). Klasifikasi akun transfer, pendapatan, belanja dan biaya

- a) Transfer antardana dan hasil dari emisi utang jangka panjang umum harus diklasifikasikan secara terpisah dari pendapatan dan belanja atau biaya dana
- b) Pendapatan dana pemerintahan harus diklasifikasikan berdasarkan dana, fungsi (program), unit organisasi, aktivitas, karakter, dan objek
- c) Pendapatan dan biaya dana kepemilikan harus diklasifikasikan sedemikian rupa seperti dalam organisasi bisnis

11). Istilah dan klasifikasi umum

Istilah dan klasifikasi umum harus digunakan secara konsisten melalui anggaran, akun, dan laporan keuangan setiap dana.

12). Laporan keuangan interim dan tahunan

- a) Laporan keuangan interim yang meliputi laporan posisi keuangan, hasil usaha, serta informasi lainnya harus disusun untuk tujuan pengendalian manajemen, pengawasan badan legislatif, dan bila perlu untuk tujuan pelaporan eksternal
- b) Laporan Keuangan Tahunan Komprehensif (*Comprehensive Annual Financial Report* atau CAFR) yaitu laporan keuangan

semua jenis dana yang berada dalam suatu unit pemerintah. Termasuk bagian pendahuluan yang memberikan gambaran laporan keuangan semua dana, catatan laporan keuangan, serta informasi tambahan lainnya

- c) Laporan Keuangan Tujuan Umum (*General Purpose Financial Statement* atau GPFS) yaitu laporan keuangan seluruh dana yang sejenis dikonsolidasikan terpisah dari laporan keuangan komprehensif
- d) Laporan Keuangan Unit Komponen (*Component Unit Financial Report* atau CUFR) yaitu laporan keuangan setiap dana tanpa dikonsolidasikan dalam suatu laporan keuangan dana yang sejenis

5. Peranan Anggaran

Dalam organisasi pemerintahan yang menggunakan akuntansi dana, anggaran merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari siklus akuntansi. Penganggaran adalah proses alokasi sumber-sumber yang terbatas kepada aktivitas yang tidak terbatas. Sedangkan anggaran adalah jumlah rupiah yang direncanakan untuk aktivitas yang dilakukan pada periode waktu tertentu (Baldric & Bonni, 1999:38). Dalam sektor pemerintahan, anggaran memainkan peranan penting dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi hasil operasi sebagaimana yang ditetapkan oleh GASB.

Anggaran yang merupakan suatu rencana yang terperinci mengenai perolehan dan penggunaan keuangan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Anggaran pendapatan berisi sumber keuangan yang akan diterima sedangkan anggaran belanja merupakan batas yang bisa dibelanjakan oleh pemerintah. Karena merupakan alat pengendali penting dan merupakan bagian integral dari sistem akuntansi, dilakukan pencatatan anggaran dalam akuntansi dana pemerintahan. Akun dan realisasinya dicantumkan dalam laporan keuangan.

Ada dua jenis anggaran yaitu (1) anggaran tetap (*fixed budget*) yang merupakan anggaran dimana pengeluaran (biaya) ditetapkan batasan absolutnya tanpa melihat tingkat operasi dan (2) anggaran fleksibel (*flexible budget*) dimana tingkat pengeluaran (biaya) yang dianggarkan dihubungkan dengan tingkat operasi yang dilakukan. Dana yang bersifat belanja biasanya menggunakan anggaran tetap sebaliknya dana yang bersifat nonbelanja biasanya menggunakan anggaran fleksibel. Penyusunan anggaran seringkali tanpa memperhatikan prinsip akuntansi melainkan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Anggaran seringkali juga didasarkan pada penerimaan dan pengeluaran kas (basis kas).

C. Keuangan Daerah

1. Pengertian

Faktor keuangan merupakan tulang punggung terselenggaranya aktifitas pemerintahan daerah. Keuangan dalam arti keseluruhan merupakan harta benda yang menjadi kekayaan daerah (Wajong,1993:1). Keuangan merupakan masalah yang berkisar sekitar proses pendapatan dan pembelanjaan pemerintahan.

Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, daerah membutuhkan dana atau uang. Uang adalah (Wajong, 1993:9) :

- A. Alat untuk mengukur barang dan harga jasa
- B. Alat untuk menukar barang dan jasa
- C. Alat penabung

Sebagai alat pengukur, penukar dan penabung, uang menduduki posisi yang penting dalam penyelenggaraan rumah tangga daerah. Keadaan keuangan daerah akan menentukan corak, bentuk dan kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Daerah sebagai badan hukum publik, yang atas dasar pemberian hak otonomi, mempunyai kebebasan memelihara dan memajukan kepentingan daerah dengan keuangan sendiri.

2. Sumber Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber keuangan organisasi pemerintahan berbeda dengan organisasi komersial, sehingga pertanggungjawabannya juga berbeda. Sumber

keuangan organisasi pemerintahan umum biasanya berasal dari pajak, pengeluaran obligasi, subsidi, donasi, serta bantuan, pinjaman, dan transfer antar unit pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999, penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dibiayai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas :

A. Pendapatan asli daerah, yaitu :

- 1) Hasil pajak daerah
- 2) Hasil retribusi daerah
- 3) Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

B. Dana perimbangan :

- 1) Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam.
- 2) Dana alokasi umum
- 3) Dana alokasi khusus

C. Pinjaman daerah

D. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Melihat sumber-sumber penerimaan daerah tersebut, patutlah dibuat suatu sistem informasi keuangan daerah yang merupakan data terbuka untuk diketahui masyarakat. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas,

nyata dan bertanggungjawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara propinsi dan kabupaten yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintah daerah (Yenni, 2000).

3. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah terbagi antara beberapa satuan yang terpisah :

- 1) Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda) bertanggungjawab pada kepala daerah dalam hal menyiapkan anggaran tahunan, menyetujui dan mengendalikan pengeluaran, membuat catatan keuangan dan membukukan. Semua tugas ini dijalankan dalam lingkungan sekretariat oleh biro/bagian keuangan.
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bertugas menyusun kebijaksanaan dan program dalam kaitan dengan anggaran pembangunan tahunan dan menyiapkan rencana pembangunan lima tahun daerah.
- 3) Bagian Pembangunan bertugas sebagai koordinator proyek-proyek yang dibiayai dari anggaran pembangunan daerah dan bertanggungjawab memantau pelaksanaan proyek-proyek tersebut dari segi fisik dan keuangan.
- 4) Dinas Pendapatan Daerah bertanggungjawab langsung pada kepala daerah dan bertugas memungut berbagai pajak, retribusi

daerah, biaya surat ijin dan kutipan lain-lain. Dinas pendapatan daerah juga bertugas sebagai koordinator kegiatan memantau dan melaporkan semua penerimaan.

- 5) Bank Pembangunan Daerah (BPD); menerima, mengawasi dan mengeluarkan uang dan menerbitkan cek atas nama pemerintah daerah.
- 6) Masing-masing pemerintah daerah memiliki inspektorat (Inspektorat Wilayah Daerah); tugasnya mencakup memeriksa keuangan daerah.

Tujuan utama pengelolaan keuangan daerah adalah (Maris, 1989:279):

- 1) Ketanggungjawaban (*accountability*): Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Unsur-unsur penting tanggungjawab mencakup keabsahan dan pengawasan.
- 2) Mampu Memenuhi Kewajiban Keuangan : Keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, jangka pendek dan jangka panjang (termasuk pinjaman jangka panjang).
- 3) Kejujuran : Urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur dan kesempatan untuk berbuat curang diperkecil.
- 4) Hasil Guna (*effectiveness*) dan Daya Guna (*efficiency*) Kegiatan Daerah: Tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan

dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya.

- 5) Pengendalian : Petugas keuangan pemerintah daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan diatas tercapai.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan yaitu dengan mengumpulkan data dilokasi yang akan diteliti dan didukung dengan penelitian kepustakaan.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian yaitu :

- a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- b) Sub Dinas Pendapatan Daerah
- c) Bagian Keuangan Daerah
- d) Bagian Pembangunan Daerah
- e) Biro Pusat Statistik
- f) Pihak-pihak lain yang terkait dalam pengelolaan keuangan daerah

2. Objek penelitian yaitu :

- a) Data-data mengenai sumber pendapatan maupun pengeluaran daerah
- b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- c) Program-program pembangunan pemerintah daerah untuk periode tertentu

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belu yang berlokasi di Atambua-Nusa Tenggara Timur.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai bulan Mei 2001.

D. Data yang dicari

Data yang dicari dalam penelitian ini yaitu data-data mengenai sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran daerah, usulan-usulan proyek dan realisasi fisik maupun keuangan proyek-proyek

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

1. Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait mengenai proses akuntansi/pembukuan dan mekanisme pengelolaan dana pembangunan daerah.
2. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti terutama kegiatan pembukuan.
3. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti yaitu mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penerimaan Daerah, Usulan-Usulan dan Realisasi Fisik maupun Keuangan Proyek.

F. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan yang ada, data-data yang diperoleh, dianalisis dengan langkah-langkah berikut :

1. Mendeskripsikan data-data yang ada pada literatur-literatur terutama mengenai sistem akuntansi dana yang diformulasikan oleh *Governmental Accounting Standard Board (GASB)*.
2. Mengidentifikasi kondisi pemerintah daerah Kabupaten Belu yang menjadi objek penelitian, berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
3. Mengidentifikasi apakah kondisi pemerintah daerah Kabupaten Belu secara teoritis memenuhi syarat untuk diterapkan akuntansi dana dalam pengelolaan keuangan daerah. Adapun syarat-syarat secara teoritis yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu dalam menerapkan akuntansi dana yang ideal meliputi 12 prinsip akuntansi yang diformulasikan oleh GASB yaitu :
 - 1) Akuntansi dan pelaporan
 - 2) Sistem akuntansi dana
 - 3) Jenis-jenis dana
 - 4) Jumlah dana
 - 5) Akuntansi aktiva tetap dan utang jangka panjang umum
 - 6) Penilaian aktiva tetap
 - 7) Depresiasi aktiva tetap

- 8) Basis akrual dalam akuntansi pemerintahan
 - 9) Penganggaran, pengendalian melalui anggaran dan pelaporan anggaran
 - 10) Klasifikasi akun transfer, pendapatan, belanja dan biaya
 - 11) Istilah dan klasifikasi umum
 - 12) Laporan keuangan interim dan tahunan
4. Membandingkan data-data yang diperoleh dengan konsep-konsep teoritis, sehingga dapat disimpulkan apakah akuntansi dana memungkinkan untuk diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DAERAH

A. Keadaan Geografi

Kabupaten Belu, salah satu dari tiga belas Kabupaten/kotamadya di Propinsi Nusa Tenggara Timur, terletak pada koordinat 124 – 126 derajat lintang selatan. Sebelah utara berbatasan dengan selat Ombai, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Timor, sebelah timur berbatasan dengan bekas propinsi Timor Timur dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan.

Luas wilayah Kabupaten Belu 244,57 Km persegi, keseluruhannya berupa daratan. Kabupaten Belu terbagi dalam delapan Kecamatan Induk dan empat Kecamatan Pembantu. Kecamatan Tasifeto Barat merupakan kecamatan terluas, sedangkan Kecamatan Kota Atambua sebagai ibukota kabupaten mempunyai luas paling kecil.

Daerah Kabupaten Belu beriklim tropis, umumnya berubah-ubah tiap setengah tahun berganti dari musim kemarau dan musim penghujan. Letak geografis yang lebih dekat dengan Australia dibanding Asia, membuat Kabupaten Belu memiliki curah hujan yang rendah.

B. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Belu pada tahun 2000 berjumlah 277.137 jiwa dengan luas wilayah 2445,57 Km persegi. Dengan demikian tingkat kepadatan penduduk tahun 2000 rata-rata 113,32 jiwa / Km persegi. Dari jumlah 277.137 ini 138.391 adalah laki-laki sedangkan perempuan berjumlah 138.746. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Belu dari tahun ke tahun sedikit banyak mengalami peningkatan. Jumlah penduduk dari tahun 1995 – 1999 seperti terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV. Keadaan Penduduk Kabupaten Belu

Tahun	Jumlah
1995	233.522 jiwa
1996	240.654 jiwa
1997	243.236 jiwa
1998	246.251 jiwa
1999	252.750 jiwa

Sumber: Biro Pusat Statistik Kab. Belu

C. Pemerintahan

Kabupaten Belu dikepalai oleh seorang Bupati, wilayahnya dibagi atas delapan kecamatan induk yaitu :

1. Kecamatan Malaka Barat
2. Kecamatan Malaka Timur
3. Kecamatan Malaka Tengah
4. Kecamatan Kobalima
5. Kecamatan Lamaknen
6. Kecamatan Tasifeto Timur
7. Kecamatan Tasifeto Barat
8. Kecamatan Kota Atambua

dan empat kecamatan pembantu yaitu :

1. Kecamatan Pembantu Malaka Barat
2. Kecamatan Pembantu Malaka Tengah
3. Kecamatan Pembantu Tasifeto Timur
4. Kecamatan Pembantu Tasifeto Barat

Tiap kecamatan induk dikepalai oleh oleh seorang camat sedangkan kecamatan pembantu dikepalai oleh camat pembantu.

D. Sosial

1. Pendidikan

Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi berbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya peran pendidikan membuat

bidang pendidikan menjadi perhatian dari pemerintah maupun masyarakat. Secara umum perkembangan pendidikan di Kabupaten Belu mengalami kemajuan. Tahun 1999/2000 banyaknya sekolah, guru, dan murid di Kabupaten Belu sebagai berikut :

1. Taman Kanak-Kanak : terdapat 17 buah sekolah dengan murid 774 orang dan 63 orang guru.
2. Sekolah Dasar (SD) : terdapat 282 buah sekolah dengan jumlah murid 45.557 orang dan 1.611 orang guru.
3. Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) Umum : terdapat 32 buah sekolah dengan jumlah murid 7.342 orang dan jumlah guru 401 orang.
4. Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Umum : terdapat 8 buah sekolah dengan jumlah murid 4.043 orang dan jumlah guru 180 orang.
5. Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Kejuruan : terdapat 4 buah sekolah yang terdiri atas 1 Sekolah Teknik Menengah (STM) dengan jumlah murid 274 orang dan jumlah guru 29 orang, 1 Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) dengan jumlah murid 163 dan jumlah guru 15 orang dan 2 Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) yang terdiri atas 1.082 orang murid dan 64 orang guru.

2. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan dapat tercapai derajat

kesehatan masyarakat yang baik, yang akhirnya semua warga masyarakat memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif. Oleh karena itu di Kabupaten Belu pelayanan kesehatan dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh dengan dibangunnya Puskesmas-Puskesmas maupun Rumah Sakit di setiap kecamatan maupun di desa-desa serta penempatan atau penyediaan tenaga-tenaga medis.

3. Agama dan Sosial Lainnya

Mayoritas penduduk Kabupaten Belu beragama Katolik selain terdapat juga agama-agama lain yaitu Islam, Kristen Protestan, Hindu, dan Budha. Kerukunan antar agama diupayakan untuk senantiasa tercipta. Di Kabupaten Belu juga terdapat sejumlah fakir miskin, penyandang cacat, manusia lanjut usia (jompo), dan lain-lain. Selain itu terdapat juga beberapa kejadian alam yang sering terjadi seperti banjir dan lain-lain.

E. Sumber Daya Alam

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Belu bermata pencaharian petani. Tanaman pangan meliputi tanaman bahan makanan terutama padi dan jagung, sayur-sayuran, buah-buahan maupun ubi-ubian dan kacang-kacangan. Tanaman pangan perkebunan merupakan tanaman perdagangan yang cukup potensial yaitu kelapa, kopi, dan kemiri.

Pembangunan sub sektor peternakan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak beserta hasilnya dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat,

disamping meningkatkan pendapatan peternak. Gambaran umum mengenai populasi ternak di Kabupaten Belu yaitu bahwa penduduk di Kabupaten Belu lebih banyak memelihara sapi ataupun kerbau, walaupun terdapat hewan-hewan peliharaan lain seperti babi, anjing, ayam dan jenis unggas yang lain. Populasi ternak ini selain dipelihara oleh penduduk, juga hidup secara liar di hutan.

F. Keadaan Keuangan Daerah

Dalam perencanaan anggaran dan belanja negara pemerintah menganut prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belu tahun Anggaran 2000 sebesar Rp. 45.367.180.750,00 terdiri dari :

A. PENDAPATAN

- Pendapatan.....Rp. 45.367.180.750,00

B. BELANJA

- Rutin.....Rp. 32.678.215.750,00
- Pembangunan.....Rp. 12.688.965.000,00
- Rp. 45.367.180.750,00

Dilihat dari segi penerimaan, kondisi keuangan daerah tingkat II Belu menunjukkan masih rendahnya kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam menopang penerimaan daerah. Penerimaan Asli Daerah berjumlah Rp. 1.872.859.000,00 sedangkan penerimaan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi berjumlah Rp. 43.494.321.750,00. Sumber

penerimaan yang terbesar dari subsidi daerah otonom yaitu sebesar Rp. 29.267.174.000,00.

Dilihat dari segi belanja, pada sisi pengeluaran rutin, pengeluaran terbesar adalah pada pos belanja pegawai yaitu sebesar Rp. 30.013.817.550,00. Pada sisi pengeluaran pembangunan pos pengeluaran terbesar terdapat pada pengeluaran sector transportasi yaitu sebesar Rp. 3.945.000.000.00.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian ini penulis lakukan di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Belu yang berlokasi di Atambua - Propinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian dilakukan untuk mengetahui kemungkinan diterapkannya akuntansi dana dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah. Data utama yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah data yang berasal dari bagian keuangan, bagian pembangunan, dinas pendapatan daerah dan data dari badan perencanaan pembangunan daerah. Data tersebut berupa data-data mengenai sumber penerimaan maupun pengeluaran daerah, program-program dan proyek-proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang berhubungan dengan sumber dan jenis dana yang ada. Secara teoritis dalam akuntansi dana, sistem akuntansi pemerintahan harus diorganisasikan dan dioperasikan atas dasar dana. Dana dibentuk untuk mengendalikan sumber keuangan yang terbatas dan tertentu untuk menjamin dan menentukan kesesuaiannya dengan batasan hukum dan administrasi.

Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data mengenai sumber-sumber penerimaan daerah (tabel.V), usulan-usulan proyek yang merupakan prioritas dan menurut sumber dana (tabel. VI dan VII), maupun realisasi fisik keuangan proyek-proyek (tabel. VIII), dan data mengenai keuangan pemerintah daerah seperti yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data-data pada tahun anggaran 2000.

Tabel V : Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2000

No.	Keterangan	Jumlah
I.	PENERIMAAN ASLI DAERAH	
	A. PAJAK-PAJAK	
1.	Pajak hotel dan restoran	Rp 52.770.000,-
2.	Pajak hiburan	3.270.000,-
3.	Pajak reklame	7.100.000,-
4.	Pajak penerangan jalan	46.000.000,-
5.	Pajak pengambilan dan pengolahan bahan golongan C	464.000.000,-
	Jumlah :	Rp573.140.000,-
	B. RETRIBUSI DAERAH	
1.	Retribusi pelayanan kesehatan	Rp421.724.000,-
2.	Retribusi pelayanan persampahan	11.770.000,-
3.	Penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil	125.356.000,-
4.	Pelayanan pemakamam dan penguburan mayat	15.000.000,-
5.	Retribusi parkir	10.000.000,-
6.	Retribusi pasar	110.000.000,-
7.	Retribusi air bersih	7.200.000,-
8.	Retribusi pemakaian kekayaan	125.441.000,-
9.	Retribusi terminal bus	162.000.000,-
10.	Retribusi rumah potong hewan	75.000.000,-
11.	Retribusi tempat rekreasi dan olahraga	1.500.000,-

	12. Retribusi penj. Produksi usaha daerah	30.225.000,-
	13. Retribusi ijin mendirikan bangunan	6.000.000,-
	14. Retribusi ijin trayek	3.300.000,-
	15. Retribusi ijin pengambilan hasil hutan ikutan	25.000.000,-
	JUMLAH :	1.116.016.000,-
	C. LABA USAHA DAERAH	
	1. Penerimaan daerah Belu Bakti	Rp 50.000.000,-
	Jumlah :	Rp 50.000.000,-
	D. PENERIMAAN LAIN-LAIN	
	1. Jasa giro	Rp 45.000.000,-
	2. Sumbangan pihak ketiga	25.000.000,-
	3. Penerimaan Ganti rugi atas kekayaan daerah (TP/TGR)	28.121.000,-
	4. Denda keterlambatan pelak. pek. Daerah	20.000.000,-
	5. Angsuran cicilan kend. Bermotor	5.582.000,-
	6. Pendapatan lain-lain	10.000.000,-
	Jumlah :	133.703.000,-
	JUMLAH A –D (PAD)	1.872.859.000,-
II.	PENERIMAAN BAGI HASIL BUKAN PAJAK.	
	A. BAGI HASIL PAJAK	
	1. Pajak bumi dan bangunan	2.503.335.000,-
	Jumlah :	2.503.335.000,-

	B. BAGI HASIL BUKAN PAJAK	
1.	Iuran hasil hutan	Rp 50.000.000,-
2.	Pemberian hak atas tanah	3.750.000,-
3.	Bagi hasil penj. Cendana	63.500.000,-
	Jumlah :	117.250.000,-
	JUMLAH A-B	2.620.585.750,-
	TOTAL	4.493.444.750,-

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Belu

Selanjutnya data-data mengenai usulan-usulan proyek maupun realisasi fisik keuangan sebagaimana terdapat dalam tabel-tabel berikut, menunjukkan rencana penggunaan dana-dana yang ada maupun realisasi penggunaan dana-dana yang ada pada pemerintah daerah Kabupaten Belu terutama untuk membiayai proyek-proyek yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terutama dalam lampiran belanja pembangunan (lampiran 3) terlihat program-program pemerintah daerah yang dibiayai dari dana-dana yang ada. Masing-masing program maupun proyek-proyek yang ada dibiayai oleh sumber-sumber dana yang ada sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Tabel VI. Prioritas Pemanfaatan Dana Pembangunan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2000/2001 Kabupaten Belu

No.	Uraian Proyek	Jumlah Dana
	DANA UMUM	
1.	Dana Umum	103,115,332
	DANA KHUSUS	
2.	Perhubungan & Penanganan Jalan	15,318,580
3.	Perbaikan Perumahan & Pemukiman	10,615,000
4.	Penyehatan Lingkungan Pemukiman	2,050,000
5.	Revitalisasi Pasar Kecamatan	1,400,000
6.	Sistem Kewaspadaan Pangan & Gisi	260,000
7.	Pembangunan Revitalisasi SD/MI	6,985,000
8.	Pembangunan Rehabilitasi Panti & Sarana Sosial	183,500
9.	Penyuluhan Pertanian Lapangan PPL	450,000
10.	Pemberdayaan Penangkar Benih Bibit Pertanian	100,000
11.	Pengembangan Industri Kecil	140,000
12.	Penghijauan	2,305,000
13.	Pengendalian Dampak Lingkungan	185,000
14.	Pembinaan Kecamatan	120,000
15.	Program Pengembangan Wilayah	3,500,000
16.	Perencanaan Pemantauan & Pengawasan Pembangunan Kabupaten/Kota	1,300,000
17.	Penyediaan & Pengelolaan Air Bersih	3,399,000
	Jumlah Dana Khusus	48,311,080

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Belu

Tabel VII. Rekapitulasi Usulan Proyek Menurut Sumber Dana Tahun Anggaran 2000/2001 Kabupaten Belu

No.	Sumber Dana	Jumlah Proyek	Jumlah Biaya
1.	APBD II	67	17,856,800
2.	APBD I	36	5,156,970
3.	APBN	415	123,912,642
4.	BLN	5	4,500,000
5.	SWASTA	0	0
	JUMLAH	523	151,426,412

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Belu

Tabel VIII. Rekapitulasi Fisik Keuangan Proyek-Proyek Tahun Anggaran 2000 Kabupaten Belu

No.	Keterangan	Dana (Rp)	Fisik	Keuangan
1.	Dana Umum	4.584.047.000	100,00	99,08
2.	Dana Khusus	17.802.515.000	100,00	99,99
3.	Dana Jaring Pengaman Sosial	6.770.665.000	99,16	98,33
4.	Dana Pembangunan Propinsi	1.455.408.000	96,13	95,07
5.	APBD Kabupaten	992.168.000	97,47	96,20
6.	Dana Khusus Pembangunan Desa/Kelurahan	1.602.050.000	100,00	100,00
7.	Dana Bantuan Luar Negeri	44.616.918.000	81,45	79,45
	JUMLAH	77.823.771.000	96,17	95,57

Sumber: Bagian Pembangunan Kab. Belu

B. Pembahasan dan Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan yang ada seperti yang diungkapkan dalam bab I yaitu apakah akuntansi dana memungkinkan untuk diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah maka berikut dilakukan analisis data dan pembahasan yang diperoleh dari hasil penelitian. Analisis data dan pembahasan ini dilakukan dengan menggambarkan kondisi yang ada pada pemerintah daerah Kabupaten Belu sebagai objek penelitian. Kemudian kondisi pemerintah daerah dibandingkan dengan teori-teori yang ada dalam literatur yang digunakan.

Pemerintah daerah mencatat semua transaksi keuangan tentang penerimaan dan pembayaran tunai. Dasar pembukuannya bersifat tidak berpasangan (*single-entry*). Catatan keuangan terpisah, tanpa kaitan antara

uang tunai, harta dan utang. Sistem pembukuan yang digunakan adalah sistem pembukuan yang berdasarkan atas dasar kas/ pembukuan yang bersifat tunai. Pembukuan dipusatkan dibagian keuangan yang menyimpam berkas-berkas penerimaan dan pembayaran. Buku-buku yang digunakan antara lain: buku kas umum berbentuk skontro dimana sisi debit digunakan untuk mencatat penerimaan dan sisi kredit digunakan untuk mencatat pengeluaran, buku kepala/buku pembantu untuk setiap jenis mata anggaran dan buku bank yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan melalui rekening kas di bank. Buku kas dipegang oleh bendaharawan pemerintah daerah. Catatan penerimaan dikerjakan dan disimpan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam hal penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya. Prosedur pembukuan yang ada di Kabupaten Belu secara umum antara lain sebagai berikut:

- 1) Bendaharawan rutin/proyek mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke bagian keuangan, diagenda dan diteruskan ke sub bagian perbendaharaan, diteliti lalu diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU).
- 2) Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) diterima oleh bendahara dan ditukar dengan cek di Pemegang Kas Daerah (PKD).
- 3) Cek ditukar dengan uang di PT. Bank NTT cabang Atambua.
- 4) Bendahara belanja dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dimasukkan kembali ke bagian keuangan setiap tanggal 10 bulan berikutnya.



- 5) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) diagenda dan diteruskan ke sub bagian verifikasi untuk disahkan dan sampai akhir tahun anggaran dibuatkan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 6) Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang asli oleh Pemegang Kas Daerah (PKD) dimasukkan dalam Buku Kas Umum/BKU (Model Bend. IX) dan dikirim ke sub bagian pembukuan.
- 7) Setiap Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang asli diteliti dan dibukukan dalam buku besar (Model B.V) sesuai pasal yang dikuasakan kepada bendahara.
- 8) Surat Pertanggungjawaban yang telah diteliti dan disahkan, dimasukan dalam format Model Bend. 5 untuk rutin dan Model Bend. 6 untuk proyek.
- 9) Kemudian B.IV dan B. V dari pembukuan dibandingkan dengan Bend. 5 dan Bend.6 dari verifikasi untuk mendapat sisa Uang Untuk Di Pertanggungjawabkan (UUDP).

Penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dapat dikatakan bahwa yang menjadi objek pembukuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu adalah mengenai penerimaan maupun pembayaran yang bersifat tunai dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah secara nasional menganut prinsip anggaran berimbang dan dinamis dalam merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanjanya. Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belu tahun anggaran 2000 ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2000 sumber pendapatan daerah secara umum terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belu terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah dan penerimaan lain-lain. Dana perimbangan merupakan bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi yang terdiri atas penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak, subsidi daerah otonom, yang merupakan dana alokasi umum dan pos bantuan pembangunan yang merupakan dana alokasi khusus. Dana alokasi umum berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.

Segi belanja daerah berhubungan dengan aktifitas operasional sebagai unsur pelaksanaan pemerintahan daerah, dimana pemerintah daerah melakukan pengeluaran sesuai dengan sifat kegiatannya baik rutin maupun proyek. Proyek pembangunan terutama mengenai belanja pembangunan, pada prinsipnya pengeluarannya dikelompokkan/dibagi dalam beberapa

bidang, kemudian masing-masing bidang dibagi dalam beberapa sektor dan setiap sektor dibagi dalam sub sektor, program dan proyek. Hal penting dari anggaran pembangunan/belanja pembangunan adalah dilihat dari sudut dana. Program, proyek/sub proyek dari setiap sektor maupun sub sektor di Kabupaten Belu di biayai dari sumber dana umum, sumber dana khusus, dan PBB sektor bersangkutan (lampiran 3).

Dalam rangka perencanaan dan persiapan pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 1999/2000, pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan yang menitikberatkan pada desentralisasi dan penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1999 tanggal 11 Pebruari 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Surat Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No. 922/D.V/02/1999 tanggal 18 Pebruari 1999 tentang Pedoman Umum Dana Pembagunan Daerah tahun anggaran 1999/2000 serta memperhatikan Nota Keuangan RAPBN 1999/2000 yang disampaikan dalam pidato Presiden RI pada sidang paripurna DPR RI tanggal 5 Januari 1999 bahwa untuk memenuhi aspirasi mengenai peningkatan otonomi daerah serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, Bantuan Pembangunan Daerah (INPRES) diubah namanya menjadi Dana Pembangunan Daerah.

Dana Pembangunan Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah tingkat II yang diberikan untuk memperkuat kemampuan daerah tingkat II dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan

pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan di daerah. Dana Pembangunan Daerah diadministrasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD dan di pertanggungjawabkan oleh Bupati kepada DPRD.

Dana-dana yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Belu yaitu:

1. Dana umum.
2. Dana Khusus.
3. Dana Jaring Pengaman Sosial.
4. Dana Pembangunan Propinsi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Dana Khusus Pembangunan Desa/Kelurahan
7. Dana Bantuan Luar Negeri.

Sumber-sumber dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu selain pendapatan asli daerah dan penerimaan bagi hasil bukan pajak terdiri atas :

- 1 APBD I
- 2 APBD II
- 3 Bantuan Luar Negeri
- 4 Swasta
- 5 APBN

Secara garis besar mekanisme pengelolaan dana pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1 Berdasarkan hasil-hasil yang didapat dari Musyawarah Pembangunan (Musbang) dan diskusi UDKP pada tingkat kecamatan, dinas/instansi otonom daerah menyusun usulan rencana program/proyek pada sektor-sektor yang sesuai bidangnya.
- 2 Seluruh usulan program atau kegiatan dari dinas/instansi otonom daerah dibahas dalam rapat koordinasi pembangunan (RAKORBANG). Bappeda kemudian menuangkan seluruh usulan program/proyek yang akan dibiayai melalui berbagai sumber dana dalam APBD II dan telah disepakati pada RAKORBANG sesuai dengan prioritas kedalam format UR-1.
- 3 Hasil UR-1 selanjutnya RAKORBANG tingkat I yang kemudian direkapitulasikan oleh Bappeda tingkat I kedalam format UR-II.
- 4 Seiring dengan proses penyusunan APBD, untuk pengendalian perencanaan Dana Pembangunan daerah, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a) Berdasarkan plafon dana dalam Daftar Alokasi Dana Pembangunan Daerah (DA-DPD), masing-masing dinas/instansi membuat rencana definitif pada sektor-sektor sesuai bidangnya berdasarkan usulan rencana (UR-1) yang telah disahkan.
 - b) Rencana definitif tersebut dibahas oleh Bappeda dan bagian penyusunan program daerah.
 - c) Bappeda menuangkan hasil-hasil pembahasan berupa program/proyek yang akan dibiayai oleh berbagai sumber dana dalam APBD II kedalam format RD-1.

Sebagai pertanggungjawaban terhadap pengelolaan Dana Pembangunan Daerah, guna memberikan informasi tentang kinerja pengelolaan di daerah, pemerintah daerah melakukan penyusunan Laporan Usulan Rencana dan Laporan Realisasi Fisik Keuangan, selain beberapa laporan lainnya. Format usulan rencana merupakan daftar isian yang berisi informasi tentang seluruh kegiatan/proyek pembangunan daerah dari berbagai sumber dana yang ada sebagai pembahasan dalam RAKORBANG tingkat II. Sedangkan format realisasi fisik dan keuangan (RFK) merupakan daftar isian yang berisi kemajuan fisik dan keuangan serta permasalahan pada pelaksanaan berbagai kegiatan/proyek.

Seperti yang diformulasikan oleh GASB, terdapat 12 prinsip akuntansi pemerintahan yang perlu diperhatikan dalam penerapan akuntansi dana. Masing-masing prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

1) Akuntansi dan pelaporannya

Pemerintah daerah lebih cenderung menggunakan istilah pembukuan atau secara umum adalah tata usaha keuangan dalam akuntansi. Tata usaha keuangan ini intinya adalah tata buku yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dibidang keuangan, berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu serta prosedur-prosedur tertentu sehingga dapat memberikan informasi yang aktual dibidang keuangan. Sistem pembukuan yang digunakan adalah sistem tata buku dimana pengelolaan keuangan didasarkan atas penyelenggaraan anggaran belanja. Pembukuan/pencatatan setiap transaksi atau kegiatan yang ada didasarkan

atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya transaksi tersebut. Buku-buku yang digunakan antara lain buku kas umum berbentuk skontro, buku kepala atau buku pembantu untuk setiap jenis mata anggaran, dan buku bank untuk mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan melalui rekening kas di bank. Lembaga pemerintahan merupakan suatu lembaga yang tidak bertujuan mencari laba dan bertanggungjawab terhadap masyarakat umum sehingga setiap kegiatannya harus diketahui oleh masyarakat. Laporan keuangan yang pada akhirnya dihasilkan oleh pemerintah daerah adalah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurut GASB sistem akuntansi pemerintahan harus memungkinkan laporan keuangan disajikan secara wajar dengan pengungkapan secara penuh tentang posisi keuangan dan hasil operasi dana dan kelompok akun unit pemerintah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum dan dapat menentukan dan menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan hukum dan kontraktual. Dengan demikian sistem akuntansi/pembukuan yang digunakan pemerintah daerah tidak mengikuti standar GASB. Pembukuan maupun laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat secara nasional dikatakan masih lemah.

2) Sistem akuntansi dana

Pemerintah daerah membutuhkan dana dalam mengurus dan mengatur daerahnya. Sumber keuangan pemerintah daerah Kabupaten Belu pada tahun anggaran 2000 terdiri dari Penerimaan Asli Daerah yaitu dari pajak-pajak, retribusi daerah, laba usaha daerah dan penerimaan lain-lain, dan

dari penerimaan bagi hasil bukan pajak. Sistem akuntansi yang dipakai oleh pemerintah daerah belum dapat dikatakan dioperasikan dan ditentukan berdasarkan pembentukan dana-dana. Sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia pada dasarnya masih terbatas pada akuntansi anggaran dan transaksi-transaksi anggaran yang pada akhirnya menghasilkan laporan operasi keuangan yang dikenal dengan perhitungan anggaran negara. Menurut GASB kesatuan akuntansi dana dibedakan atas: kelompok dana pemerintahan, kelompok dana kepemilikan dan kelompok dana kepercayaan. Ketiga kelompok dana ini dikelompokkan berdasarkan sifat aktivitas dan sumber keuangannya. Pemerintah daerah mengelompokkan dana-dana yang ada secara umum seperti yang terdapat dalam anggaran yang telah disusun.

3) Jenis-jenis dana

Jenis-Jenis dana yang digunakan oleh pemerintah daerah yaitu: Dana Umum dan Dana Khusus, Dana Pembangunan Propinsi, APBD Kabupaten, Dana Khusus Pembangunan Desa/Kelurahan, Dana Bantuan-Bantuan Luar Negeri. Sedangkan jenis-jenis dana yang harus digunakan oleh suatu unit pemerintahan menurut GASB yaitu: Dana Umum dan Dana Pendapatan Khusus yang sumber keuangannya berasal dari pajak, perijinan, penerimaan dari unit pemerintah lain, pendapatan dari pemberin jasa, serta denda dan penyitaan, Dana Proyek Modal yang berasal dari hasil penjualan utang obligasi, transfer dari dana lain, pendapatan investasi dan bantuan dari pemerintah pusat, Dana Pelunasan

Utang yang berasal dari penetapan pajak, transfer dari dana umum atau dana lain dan pendapatan investasi, Dana Perusahaan, Dana Layanan Internal, Dana Trust dan Dana Peragenan. Dengan demikian terlihat bahwa pemerintah daerah mengelompokkan jenis-jenis dana masih secara sederhana. Jenis dana yang di bentuk oleh pemerintah daerah yang sama seperti GASB yaitu dana umum dan dana pendapatan khusus.

4) Jumlah dana

Pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya menetapkan jumlah dana yang dibutuhkan sesuai dengan hukum dan administrasi, dan tentunya jumlah dana yang ada disesuaikan dengan potensi daerah yang ada. Menurut GASB unit-unit pemerintah harus menetapkan dan memelihara dana-dana yang dibutuhkan sesuai dengan aturan hukum dan administrasi. Walaupun pemerintah dapat menjamin bahwa pembentukan dana lebih sedikit atau lebih banyak dapat menjamin pengendalian yang efektif, namun pembentukan dana yang tidak diperlukan berarti melanggar ketentuan hukum. Dalam menjalankan kegiatannya pemerintah daerah pasti membutuhkan dana.

5) Akuntansi aktiva tetap dan utang jangka panjang umum

Pemerintah daerah belum mengelompokkan secara jelas antara aktiva tetap dan utang jangka panjang umum dan aktiva tetap dan dan utang jangka panjang dana karena pemerintah daerah tidak membentuk kelompok dana kepercayaan secara khusus, sebaliknya menurut GASB Aktiva tetap dan

Utang jangka panjang umum dipertanggungjawabkan melalui kelompok akun.

6) Penilaian aktiva tetap

Penilaian aktiva tetap sebenarnya merupakan hal yang baru dan masih terus berkembang dalam lembaga pemerintahan terutama pemerintah daerah. Pada dasarnya metode yang dipakai oleh pemerintah daerah dalam penilaian aktiva tetap adalah biaya perolehan historis atau jumlah pengeluaran kas untuk perolehan. Penukaran, hibah, penyitaan dan donasi dicatat dengan nilai wajar atau nilai transfer pada saat barang tersebut diperoleh. Aktiva tetap milik pemerintah daerah disebut dan dicatat dalam daftar inventaris. Menurut GASB aktiva tetap harus dinilai berdasarkan kos dan aktiva tetap donasi harus dinilai berdasarkan taksiran harga pasar pada saat diterima. Walaupun metode penilaian aktiva tetap antara GASB dan pemerintah daerah memiliki kesamaan namun dalam prakteknya sebenarnya pemerintah daerah tidak melakukan pengelompokan aktiva tetap secara khusus.

7) Depresiasi aktiva tetap

Berhubungan dengan penjelasan yang ada pada prinsip lima dan enam, pemerintah daerah tidak melakukan depresiasi aktiva tetap. Depresiasi atau penyusutan aktiva tetap tidak dinyatakan dalam realisasi anggaran tetapi dilakukan penyesuaian secara periodik. Depresiasi aktiva tetap umum dan dana tertentu tidak dicatat karena pemerintah daerah tidak membentuk kelompok dana kepercayaan, dana pemerintahan tidak

diklasifikasikan secara jelas. Berbeda dengan GASB depresiasi aktiva tetap umum tidak harus dicatat dalam akun dana pemerintahan, sedangkan depresiasi aktiva tetap dana tertentu dipertanggungjawabkan dan dicatat dalam dana kepercayaan.

8) Basis akrual dalam akuntansi pemerintahan

Secara umum pembukuan pemerintah daerah dicatat berdasarkan atas dasar kas (*cash basis*). Sedangkan GASB menentukan basis akrual modifikasian dalam akuntansi dana. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendasar antara akuntansi dana dan akuntansi pemerintahan seperti yang berlaku di Indonesia pada umumnya maupun pemerintah daerah secara khusus.

9) Penganggaran, pengendalian melalui anggaran, dan pelaporan anggaran.

Pemerintah daerah menggunakan anggaran tahunan. Ada dua bagian penting dalam anggaran yaitu pendapatan dan belanja. Anggaran pemerintah daerah ini terlihat dalam APBD yang telah ditetapkan. GASB dalam prinsipnya yang kesembilan menentukan bahwa setiap unit pemerintahan harus menggunakan anggaran tahunan. Anggaran berperan penting dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi hasil operasi. Dalam hal ini antara pemerintah daerah dan GASB memiliki persamaan sebab dalam akuntansi dana anggaran merupakan suatu hal yang penting, sedangkan objek pembukuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah daerah adalah mengenai anggaran pendapatan maupun pengeluaran.

10) Klasifikasi akun transfer, pendapatan, belanja dan biaya.

Pemerintah daerah melakukan klasifikasi yang jelas antara pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan maupun belanja pemerintah daerah diklasifikasikan berdasarkan dana, sumber dan instansi pengelola namun transfer antardana dan pendapatan maupun biaya dana kepemilikan belum diklasifikasikan secara jelas sebab pengelompokkan dana-dana yang ada masih sangat sederhana.

11) Istilah dan klasifikasi umum

Istilah dan klasifikasi umum digunakan oleh pemerintah daerah secara konsisten terutama dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan proses pembukuan (akuntansi). Sedangkan GASB menetapkan bahwa istilah dan klasifikasi umum harus digunakan secara konsisten melalui anggaran, akun, dan laporan keuangan setiap dana. Secara umum pemerintah daerah menggunakan istilah dan klasifikasi umum dalam anggaran, akun-akun yang digunakan maupun dalam laporan keuangan yang dihasilkan.

12) Laporan keuangan interim dan tahunan.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan setiap akhir tahun. Laporan keuangan pemerintah daerah pada dasarnya terdiri atas daftar selisih lebih-kurang, antara anggaran dan realisasinya yang diringkas dalam perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. GASB menetapkan bahwa setiap unit pemerintah harus menyusun laporan keuangan interim dan laporan keuangan tahunan, laporan keuangan tujuan

umum dan laporan keuangan unit komponen. Setiap dana memiliki laporan keuangan tersendiri. Berbeda dengan pemerintah daerah dimana laporan keuangan walaupun dilakukan setiap akhir periode namun diringkas dalam perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

C. Perbandingan Antara Prinsip-Prinsip GASB dengan Kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Belu

Dari pembahasan dan analisis data yang dilakukan maka dapat dibandingkan antara kondisi pemerintah daerah dengan teori-teori yang ada seperti yang diformulasikan oleh GASB terutama hal-hal mendasar dalam akuntansi dana, bahwa pemerintah daerah membentuk dana-dana dalam pengelolaan keuangan daerah namun mengelompokkan dana-dana yang ada masih sangat sederhana yang tentunya disesuaikan dengan kondisi daerah maupun ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang ada. Jumlah dana yang dibentuk masih belum tepat antara yang direncanakan dengan realisasinya. Akuntansi atau yang masih disebut dengan pembukuan, pencatatannya bersifat tidak berpasangan (*single-entry*) dan atas dasar kas (*cash basis*). Laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah pada dasarnya hanya merupakan laporan perhitungan anggaran dan belanja yang mencerminkan antara anggaran dan realisasinya.

Menurut GASB, sistem akuntansi pemerintahan harus diorganisasikan dan dioperasikan atas dasar dana. Karakteristik dari akuntansi pemerintahan yaitu menggunakan berbagai jenis dana. Dana dikelompokkan berdasarkan

fokus pengeluarannya maupun sumber keuangannya. Setiap kelompok dana memiliki berbagai jenis dana. Pemerintah membentuk jumlah dana sesuai dengan aturan hukum dan kontraktual lainnya. Walaupun pemerintah dapat menjamin bahwa pembentukan dana lebih sedikit atau lebih banyak dapat menjamin pengendalian yang efektif, namun pembentukan dana yang tidak diperlukan berarti melanggar ketentuan hukum dan kontraktual. Sistem akuntansi dana pada dasarnya bersifat berpasangan (*double-entry*) dan dengan dasar waktu yang dimodifikasi (*modified accrual*). Setiap unit pemerintahan harus menyusun laporan keuangan interim dan laporan keuangan tahunan dan setiap jenis dana pun dibuat laporan keuangan tersendiri.

Perbandingan antara kedua belas prinsip akuntansi dana dalam pengelolaan keuangan daerah secara ringkas seperti terdapat dalam tabel berikut ini.

Tabel IX. Perbandingan antara prinsip-prinsip GASB dengan kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Belu.

No	Item Perbandingan	GASB	Pemda Kab. Belu	Keterangan
1	Akuntansi dan Pelaporan	Sistem akuntansi pemerintahan harus memungkinkan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan ketentuan umum.	Sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim ada di Indonesia, namun belum sesuai dengan standar GASB.	Tidak memenuhi.
2	Sistem Akuntansi Dana	Sistem akuntansi pemerintahan harus diorganisasikan dan dioperasikan atas dasar dana.	Belum diope- rasikan dan diorganisasika n atas dasar dana	Tidak memenuhi.

No	Item Perbandingan	GASB	Pemda Kab. Belu	Keterangan
3	Jenis-jenis Dana	Dana dikelompokkan menjadi Dana Pemerintahan, Dana Kepemilikan dan Dana Kepercayaan.	Hanya ada Dana Pemerintahan.	Tidak memenuhi
4	Jumlah Dana	Unit-unit pemerintahan harus menetapkan jumlah dana sesuai dengan aturan hukum dan administrasi.	Menetapkan jumlah dana sesuai dengan aturan hukum dan administrasi.	Memenuhi
5	Akuntansi Aktiva Tetap dan Utang Jangka Panjang Umum	Harus dilakukan pembedaan yang jelas antara aktiva tetap dan utang jangka panjang umum dengan aktiva tetap dan utang jangka panjang dana.	Belum dilakukan pembedaan yang jelas antara aktiva tetap dan utang jangka panjang umum dengan aktiva tetap dan utang jangka panjang dana.	Tidak memenuhi
6	Penilaian Aktiva Tetap	Aktiva tetap harus dinilai berdasarkan kos.	Belum melakukan penilaian terhadap aktiva tetap.	Tidak memenuhi
7	Depresiasi Aktiva Tetap	Depresiasi aktiva tetap dicatat dalam kelompok dana masing-masing.	Belum melakukan depresiasi aktiva tetap.	Tidak memenuhi
8	Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintahan	Dasar akuntansi untuk dana pemerintahan adalah basis akrual modifikasi.	Basis kas dalam dana pemerintahan.	Tidak memenuhi
9	Penganggaran, Pengendalian melalui Anggaran dan Pelaporan Anggaran	Unit pemerintahan menggunakan anggaran tahunan, melakukan perbandingan & pengendalian anggaran.	Menggunakan anggaran tahunan, melakukan perbandingan & pengendalian anggaran.	Memenuhi
10	Klasifikasi Akun Transfer,	Harus diklasifikasikan.	Belum mengklasifikas	Tidak memenuhi

	Pendapatan, Belanja dan Biaya.	secara terpisah antara pendapatan, belanja, biaya dana dan transfer.	ifikasikan secara terpisah antara pendapatan, belanja, biaya dana dan transfer.	
11	Istilah dan Klasifikasi Umum	Harus digunakan secara konsisten.	Telah digunakan secara konsisten	Memenuhi
12	Laporan Keuangan Interim dan Tahunan	Laporan keuangan terdiri atas laporan keuangan interim, laporan keuangan tahunan komprehensif, laporan keuangan tujuan umum dan laporan keuangan unit komponen.	Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	Tidak memenuhi

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan mengenai penerapan akuntansi dana dalam pengelolaan keuangan daerah, ditemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari duabelas prinsip akuntansi dana sebagaimana yang telah ditetapkan oleh GASB; sembilan prinsip belum memenuhi syarat sedangkan tiga prinsip telah memenuhi syarat. Sembilan prinsip yang belum memenuhi syarat yaitu mengenai Akuntansi dan Pelaporan, Sistem Akuntansi Dana, Jenis-Jenis Dana, Akuntansi Aktiva Tetap dan Utang Jangka Panjang Umum, Penilaian Aktiva Tetap, Depresiasi Aktiva Tetap, Basis Akrua dalam Akuntansi Pemerintahan, Klasifikasi Akun Transfer, Pendapatan, Belanja dan Biaya serta Laporan Keuangan Interim dan Tahunan. Sedangkan tiga prinsip akuntansi dana yang telah memenuhi syarat yaitu mengenai Jumlah Dana, Penganggaran, Pengendalian melalui Anggaran, dan Pelaporan Anggaran serta Istilah dan Klasifikasi Umum.
2. Dengan demikian jelas bahwa akuntansi dana belum mungkin dapat diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu dalam pengelolaan keuangan daerahnya.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini tentu saja ada keterbatasan yang tidak mampu peneliti hindari:

1. Keterbatasan ruang lingkup penelitian dimana kesimpulan hanya berdasarkan data yang diperoleh dan hanya berlaku pada daerah yang menjadi objek penelitian.
2. Meskipun peneliti sudah semaksimal mungkin untuk dapat memperoleh data yang dapat dipercaya, namun tidak menutup kemungkinan adanya data yang kurang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

C. Saran

Saran yang dapat diberikan sebagai masukan kepada pemerintah daerah adalah:

1. Pemerintah daerah dapat membentuk dan mengelompokkan dana-dana yang ada sesuai dengan sifat aktivitas maupun sumber-sumber keuangan sehingga dapat lebih mudah dalam melakukan pencatatan, pengelompokkan maupun penyusunan laporan keuangan. Dengan membentuk dan mengelompokkan dana-dana, pemerintah daerah dapat membuat laporan keuangan untuk setiap kelompok dana, sehingga laporan keuangan yang dibuat tidak hanya terbatas pada perhitungan antara anggaran dan realisasinya. Selain membentuk dan mengelompokkan dana-dana yang ada, pemerintah daerah dapat menggunakan basis akuntansi yang bersifat berpasangan dengan dasar waktu yang

dimodifikasi dalam pengelolaan keuangan daerahnya, melakukan klasifikasi antara akun transfer, pendapatan, belanja dan biaya.

2. Walaupun akuntansi dana belum mungkin dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, namun prinsip-prinsip akuntansi dana ini dapat dipakai sebagai pedoman untuk menghasilkan instrumen-instrumen yang cocok dalam pengelolaan keuangan daerah terutama dalam penggunaan maupun pemanfaatan sumber-sumber keuangan daerah serta kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Belu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinta, Kustadi. (1986). *Pengantar Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: Alumni Bandung.
- Baswir, Revrisond. (1993). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPF-UGM.
- Hapsoro, Dody. (1991). *Akuntansi Dana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Lalu, Hendri. (1992). *Akuntansi Pemerintahan Disertai Mekanisme Bendaharawan Menurut Sistem Baru*. Jakarta: FE UI.
- Mangonting, Yenni. (2000). "Ide Pemberdayaan Sektor Publik dalam Otonomi Daerah dan Beberapa Teoro Otonomi Daerah". *Media Akuntansi* No.15/Th VII/November-Desember.
- Mamesah, D.J. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Maris, Masri. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Partono. (2000). "Perjalanan Panjang Pengembangan Akuntansi Pemerintahan Indonesia" dan "Laporan Keuangan Pemerintah: Upaya Menuju Transparansi dan Akuntabilitas". *Media Akuntansi* No.13-14/ThVII/September-Oktober.
- Rasuli, M. (2001). "Pelaporan Keuangan menurut GASB *Statement* No.34, dan Praktiknya di Beberapa Negara: Implikasinya Bagi Indonesia". *Media Akuntansi* No. 17/Th VII/April-Mei.
- Riwu Kaho, J. (1997). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada.
- Rosjidi. (1987). *Akuntansi Pemerintahan Akuntansi Dana*. Surabaya: Cum Laude.
- Siregar, Baldric & Siregar, Bonni. *Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Suharto, Harry. (2000). "Siapkah Akuntansi Pemerintahan Menghadapi Otonomi Daerah?" *Media Akuntansi* No.6/Th I/Pebruari.
- Wajong, J. (1993). *Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Ichtiar.

LAMPIRAN

Lampiran I

RINGKASAN : ANGGARAN PENDAPATAN DAN
K A B U P A T E N :
TAHUN ANGGARAN :

No.Urt	U R A I A N	JUMLAH
	<u>A. PENDAPATAN DAERAH</u>	Rp. 45.367.180.750,00
1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	Rp. 0,00
2.	<u>BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH :</u>	Rp. 1.872.859.000,00
	a. Pajak Daerah	Rp. 573.140.000,00
	b. Retribusi Daerah	Rp. 1.116.016.000,00
	c. Baglan Laba-Badan Usaha Milik Daerah.....	Rp. 50.000.000,00
	d. Penerimaan Lain-lain.....	Rp. 133.703.000,00
3.	BAGIAN PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMBERIAN PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI.....	Rp. 43.494.321.750,00
	a. Bagi Hasil Pajak.....	Rp. 2.503.335.750,00
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 117.250.000,00
	c. Subsidi Daerah Otonom.....	Rp. 29.267.174.000,00
	d. Bantuan Pembangunan.....	Rp. 11.608.562.000,00
	e. Penerimaan Lainnya.....	Rp. 0,00
4.	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH.	Rp. 0,00
	a. Dari Pemerintah Pusat.....	Rp. 0,00
	b. Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri.....	Rp. 0,00

DAN BELANJA DAERAH
 BELU
 2000

CONTOH A.
 LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
 NOMOR : 3 TAHUN 2000
 TANGGAL : 19 APRIL 2000

No.Urt	U R A I A N	JUMLAH
	B. BELANJA DAERAH	Rp.45.367.180.750
A.	PENGELUARAN RUTIN	Rp.32.678.215.750
1	Belanja Pegawai.....Rp.	30.013.617.550,00
2	Belanja Barang.....Rp.	960.959.250,00
3	Belanja Pemeliharaan.....Rp.	633.785.750,00
4	Belanja Perjalanan.....Rp.	293.850.000,00
5	Belanja Lain - lain.....Rp.	303.221.050,00
6	Angsuran Pinjaman / Hutang dan Bunga...Rp.	0,00
7	Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan.....Rp.	124.243.000,00
8	Pengeluaran yang tidak termasuk Bagian Lain.....Rp.	348.280.750,00
9	Pengeluaran tidak terduga.....Rp.	58.400,00
B.	PENGELUARAN PEMBANGUNAN	Rp.12.688.965.000
1	Sektor Industri.....Rp.	0,00
2	Sektor Pertanian dan Kehutanan.....Rp.	787.321.000,00
3	Sektor Sumber daya Air dan Irigasi.....Rp.	935.000.000,00
4	Sektor Tenaga Kerja.Rp.	0,00
5	Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi.Rp.	320.000.000,00
6	Sektor TransportasiRp.	3.945.000.000,00
7	Sektor Pertambangan dan Energi.Rp.	0,00
8	Sektor Pariwisata & Telekomunikasi DaerahRp.	250.000.000,00
9	Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman.Rp.	353.765.000,00
10	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.Rp.	1.207.500.000,00
11	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan Na- sional, Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, pemuda dan Olah Raga. Rp.	1.588.783.000,00
12	Sektor Keendudukan dan keluarga Se- jahteraRp.	20.000.000,00
13	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Anak dan Remaja.Rp.	351.911.000,00
14	Sektor Perumahan dan Pemukiman.....Rp.	312.000.000,00
15	Sektor AgamaRp.	0,00
16	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi...Rp.	292.637.875,00
17	Sektor HukumRp.	100.000.000,00
18	Sektor Aparatur pemerintah dan Penga- wasan.....Rp.	2.105.047.125,00
19	Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Mediamassa.Rp.	70.000.000,00
20	Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum...Rp.	50.000.000,00
21	Sektor Subsidi/ bantuan pembangunan kepada Daerah bawahanRp.	0,00
22	Bagian pembayaran kembali Pinjaman. Rp.	0,00

Lampiran II

RINGKASAN

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BELU TAHUN ANGGARAN 2000

NO. URT	URAIAN	J U M L A H		NO. URUT	URAIAN	J U M L A H	
		ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)			ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)
I.	PENDAPATAN			II	BELANJA		
1	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	1.331.467.904,00	1.944.608.475,52	A	RUTIN	37.100.598.798,00	48.081.250.350,73
2	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.872.859.000,00	1.779.639.229,00	1.	Belanja Pegawai	30.897.564.000	42.449.457.150,00
a.	Pajak Daerah	573.140.000,00	592.932.979,00	2.	Belanja Barang	2.709.859.069	2.459.845.113,00
b.	Retribusi Daerah	1.116.016.000,00	853.726.909,00	3.	Belanja Pemeliharaan.....	860.567.000	808.401.566,00
c.	Bagian Laba Usaha Daerah.....	50.000.000,00	9.500.000,00	4.	Belanja Perjalanan.....	719.872.000	670.648.850,00
d.	Lain - lain Pendapatan.....	133.703.000,00	323.479.841,00	5.	Belanja Lain - Lain	658.296.050	732.480.721,73
3.	PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMBERIAN PEMERINTAH DAN ATAU YANG ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI	57.725.345.676,00	70.669.026.926,15	6.	Angsuran Pinjaman/Hutang Dan Bunga.....	0	0,00
a.	Bagi Hasil Pajak.....	3.543.189.776,00	4.959.177.652,15	7.	Ganjaran/Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawah.....	625.102.000	436.020.000,00
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak.....	117.250.000,00	164.440.668,00	8.	Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain.....	629.264.750	524.596.950,00
c.	Subsidi Daerah Otonom.....	31.552.367.900,00	43.080.859.606,00	9.	Pengeluaran Tidak Tersangka.....	73.929	0,00
d.	Bantuan Pembangunan.....	22.512.538.000,00	22.484.549.000,00	B.	PEMBANGUNAN	23.829.073.782	23.481.803.844,00
e.	Penerimaan Lainnya.....	0	0	1.	Sektor Industri.....	0	0,00
4.	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH	0	0	2.	Sektor Pertanian Dan Kehutanan	5.163.258.150	5.146.480.125,00
a.	Pinjaman dari Pemerintah Pusat.....	0	0	3.	Sektor Sumber Daya Air Dan Irigasi	935.000.000	932.614.600,00
b.	Pinjaman dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri.....	0	0	4.	Sektor Tenaga Kerja	0	0,00
				5.	Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah Dan Koperasi.....	867.553.632	867.553.632,00
				6.	Sektor Transportasi.....	3.960.642.000	3.849.663.000,00
				7.	Sektor Pertambangan Dan Energi.....	0	0,00
				8.	Sektor Pariwisata Dan Telekomunikasi Daerah.....	426.000.000	388.045.000,00
				9.	Sektor Pembangunan Daerah Dan Pemukiman	6.237.738.000	6.146.297.450,00
				10.	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	1.254.503.000	1.192.820.000,00
				11.	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda Dan Olah Raga	1.588.783.000	1.586.124.000,00
				12.	Sektor Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera.....	20.000.000	20.000.000,00
				13.	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak Dan Remaja	351.911.000	351.371.000,00
				14.	Sektor Perumahan Dan Pemukiman	312.000.000	312.000.000,00
				15.	Sektor Agama	0	0,00
				16.	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.....	247.637.875	240.445.037,00
				17.	Sektor Hukum.....	100.000.000	100.000.000,00
				18.	Sektor Aparatur Pemerintah Dan Pengawasan.....	2.244.047.125	2.230.545.000,00
				19.	Sektor Politik Penerangan, Komunikasi dan Media Masa.....	70.000.000	67.845.000,00
				20.	Sektor Keamanan Dan Ketertiban Umum.....	50.000.000	50.000.000,00
				21.	Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawah.....	0	0,00
	J u m l a h	60.929.672.560,00	74.413.274.630,67		J u m l a h	60.929.672.560,00	71.563.054.194,73
	Bagian Urusan Kas dan Perhitungan.....	6.190.889.267,00	6.027.761.778,00		Bagian Urusan Kas dan Perhitungan.....	6.190.889.267,00	6.027.761.778,00

Lampiran III

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
 NOMOR : 3 TAHUN 2000
 TANGGAL : 19 APRIL 2000

BAB III : BELANJA PEMBANGUNAN

KODE ANGGARAN	PROGRAM, PROYEK/SUB PROYEK.	ANGGARAN TAHUN YANG LALU	ANGGARAN TAHUN INI
2P.0.1.	<u>SEKTOR INDUSTRI</u>	0	0
2P.0.01.001	<u>SUB SEKTOR INDUSTRI</u>	0	0
2P.0.2.	<u>SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN</u>	574.005.000	787.321.000
2P.0.2.1.	<u>SUB SEKTOR PERTANIAN RAKYAT</u>	326.205.000	359.821.000
2P.0.2.1.01.	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian.		359.821.000
2P.0.2.1.01.001	Proyek : Bantuan Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) , sumber dana bantuan khusus (BIPP Kabupaten Belu)		186.821.000
2P.0.2.1.01.002	Proyek : Pemberdayaan Penangkar Benih/Bibit Pertanian sumber dana khusus, (Dinas Pertanian Kab. Belu)		88.000.000
2P.0.2.1.01.003	Proyek : Peningkatan Produksi Tanaman pangan, sumber dana umum (Dinas Pertanian Kab. Belu)		85.000.000
2P.0.2.2.	<u>SUB SEKTOR PERKEBUNAN</u>	75.000.000	105.000.000
2P.0.2.2.01	Program : Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan		105.000.000
2P.0.2.2.01.001	Proyek : Pengembangan Tanaman Perdagangan, sumber dana umum (Dinas Perkebunan Kab. Belu)		85.000.000
2P.0.2.2.01.002	Proyek : Peningkatan Penyuluhan Perkebunan, sumber dana PBB Sektor Pertambangan., (Dinas Perkebunan Kab. Belu)		20.000.000
2P.0.2.3.	<u>SUB SEKTOR PETERNAKAN</u>	73.000.000	197.500.000
2P.0.2.3.01.	Program : Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan		197.500.000
2P.0.2.3.01.001	Proyek Penanggulangan Penyakit Ternak Besar dan Sensus Ternak dan Penyelesaian Rumah Potong Hewan, sumber-dana Umum (Dinas Peternakan - Kabupaten Belu).		115.000.000
2P.0.2.3.01.002	Proyek Pengembangan Produksi dan Produktivitas Peternakan sumber sumber dana PBB Sektor Pedesaan/ Perkotaan. (Dinas Peternakan Kabupaten Belu)		37.500.000
2P.0.2.3.01.003	Proyek Pencacahan Ulang Ternak Pemerintah sumber dana PBB Sektor Pedesaan / Perkotaan (Dinas Peternakan Kabupaten Belu)		45.000.000

KODE ANGGARAN	PROGRAM, PROYEK/SUB PROYEK.	ANGGARAN TAHUN YANG LALU	ANGGARAN TAHUN INI
2P.0.2.4.	<u>SUB SEKTOR PERIKANAN</u>	79.800.000	100.000.000
2P.0.2.4.01.	Program : Peningkatan Produksi dan dan Produktivitas Perikanan.		100.000.000
2P.0.2.4.01.001	Proyek : Peningkatan Sarana Produksi Perikanan Laut dan pelatihan Budidaya Kepiting, sumber dana umum. (Dinas Perikanan Kabupaten Belu)		100.000.000
2P.0.2.5.	<u>SUB SEKTOR KEHUTANAN</u>	20.000.000	25.000.000
2P.0.2.5.01.	Program : Peningkatan Produksi dan Produktivitas Kehutanan		25.000.000
2P.0.2.5.01.001.	Proyek : Pengadaan Pembibitan sumber dana PBB Sektor Pedesaan/ Perkotaan. (Dinas PKT Kabupaten Belu)		25.000.000
2P.0.3.	<u>SEKTOR SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI</u>	4.457.464.000	935.000.000
2P.0.3.1.	<u>SUB SEKTOR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR</u>	4.282.464.000	845.000.000
2P.0.3.1.01.	Program : Peningkatan Sumber Air Bersih		845.000.000
2P.0.3.1.01.001	Proyek : Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Perkotaan, sumber dana khusus (Dinas PU Kabupaten Belu)		250.000.000
2P.0.3.1.01.002	Proyek Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Pedesaan, sumber dana khusus. (Dinas PU Kabupaten Belu)		424.000.000
2P.0.3.1.01.003	Proyek : Pembinaan Petani Pemakai Air (P3A) sumber dana Umum. (Dinas Pertanian Kab. Belu)		35.000.000
2P.0.3.1.01.004	Proyek Penyehatan Lingkungan Pemukiman Pedesaan, sumber dana khusus (Dinas PU Kabupaten Belu)		136.000.000
2P.0.3.2.	<u>SUB SEKTOR IRIGASI</u>	175.000.000	90.000.000
2P.0.3.2.01.	Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi		90.000.000
2P.0.3.2.01.001	Proyek : Pembuatan Saluran Irigasi, sumber dana Umum. (Dinas PU Kab. Belu)		90.000.000
2P.0.4.	<u>SEKTOR TENAGA KERJA</u>	0	0
2P.0.4.01	<u>SUB SEKTOR TENAGA KERJA</u>	0	0

KODE ANGGARAN	PROGRAM, PROYEK/SUB PROYEK.	ANGGARAN TAHUN YANG LALU	ANGGARAN TAHUN INI
2P.0.5.	<u>SEKTOR PERDAGANGAN , PENGEMBANGAN USAHA DAERAH KEUANGAN DAN KOPERASI</u>	721.000.000	320.000.000
2P.0.5.2.	<u>SUB SEKTOR PENGEMBANGAN USAHA DAERAH</u>	10.000.000	30.000.000
2P.0.5.2.01.	Program : Peningkatan Usaha Daerah.		30.000.000
2P.0.5.2.01.001	Proyek : Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BPD NTT Cabang Alambua, sumber dana PBB sektor Pertambangan. (Bagian Keuangan Setda Belu)		10.000.000
2P.0.5.2.01.002	Proyek : Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Belu Bhakti, sumber dana PBB sektor Pertambangan. (Bagian Keuangan Setda Belu)		20.000.000
2P.0.5.3.	<u>SUB SEKTOR KEUANGAN DAERAH</u>	50.000.000	150.000.000
2P.0.5.3.01.	Program : Peningkatan Administrasi Keuangan Daerah		150.000.000
2P.0.5.3.01.001.	Proyek : Pengembangan Administrasi Keuangan Daerah/Gaji, sumber dana dana Umum. (Bagian Keuangan Setda Belu)		150.000.000
2P.0.5.4.	<u>SUB SEKTOR KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL</u>	661.000.000	140.000.000
2P.0.5.4.01.	Program : Peningkatan Pasar Impres dan Pengusaha Kecil.		140.000.000
2P.0.5.4.01.001	Proyek Penyediaan Sarana Usaha dan Pelatihan, sumber dana umum. (Bagian Perekonomian Setda Belu)		50.000.000
2P.0.5.4.01.002	Proyek Pengembangan Industri dan Perdagangan, sumber dana umum.(Bagian Perekonomian Setda Belu)		90.000.000
2P.0.6.	<u>SEKTOR TRANSPORTASI</u>	7.077.947.700	3.945.000.000
2P.0.6.1.01.	<u>SUB SEKTOR PRASARANA JALAN</u>	7.077.947.700	3.945.000.000
2P.0.6.1.01.	Program : Peningkatan Prasarana Jalan.		3.945.000.000
2P.0.6.1.01.001	Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten sumber dana Khusus. (Dinas PU Kab. Belu)		3.400.000.000

KODE ANGGARAN	PROGRAM, PROYEK/SUB PROYEK.	ANGGARAN TAHUN YANG LALU	ANGGARAN TAHUN INI
2P.0.6.1.01.002	Proyek : Pembangunan Lanjutan Terminal AKAP (Pelataran), Rehab Terminal Kota, dan Pengadaan rambu lalu lintas, sumber dana umum. (Dinas LLAJ Kab. Belu)		270.000.000
2P.0.6.1.01.003	Proyek : Pembuatan Jalan Trotoar dan Pembuatan Saluran dalam Kota Atambua dan Bronjong Kall Talau , sumber dana Umum. (Dinas PU Kab. Belu)		150.000.000
2P.0.6.1.01.004	Proyek Revisi RT/RW Kabupaten dan Land Consolidation (LC), sumber dana umum. (Kantor Bappeda Kab. Belu)		125.000.000
2P.0.7.	SEKTOR PERTAMBANGAN RAKYAT DAN ENERGI	0	0
2P.0.7.1	SUB SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	0	0
2P.0.8.	SEKTOR PARIWISATA DAN TELEKOMUNIKASI DAERAH	304.000.000	250.000.000
2P.0.8.1.	SUB SEKTOR PARIWISATA	220.000.000	200.000.000
2P.0.8.1.01.	Program : Pengembangan Produksi Pariwisata		200.000.000
2P.0.8.1.01.001.	Proyek Pengembangan Cbyek Wisata di Kabupaten Belu dan Pagelaran Budaya Timor, sumber dana umum. (Dinas Pariwisata Kab. Belu)		200.000.000
2P.0.8.2.	SUB SEKTOR TELEKOMUNIKASI	84.000.000	50.000.000
2P.0.8.2.01.	Program : Pembinaan dan Pengembangan Pers Radio.		50.000.000
2P.0.8.2.01.001	Proyek : Peningkatan Pers Radio, sumber dana PBB Sektor Pertambangan. (Bagian Humas Setda Belu)		25.000.000
2P.0.8.2.01.002	Proyek : Pengadaan SSB, sumber dana PBB Sektor Pertambangan. (Bagian Umum Setda Belu)		25.000.000

KODE ANGGARAN	PROGRAM, PROYEK/SUB PROYEK.	ANGGARAN TAHUN YANG LALU	ANGGARAN TAHUN INI
2P.0.9.	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN PEMUKIMAN	8.973.555.000	353.765.000
2P.0.9.1	SUB SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH BAWAHAN	492.300.000	0
2P.0.9.2.	SUB SEKTOR PEMBANGUNAN KOTA	0	0
2P.0.9.3.	SUB SEKTOR PEMBANGUNAN DESA	8.442.755.000	284.000.000
2P.0.9.3.01.	Program : Peningkatan Pembangunan Desa.		284.000.000
2P.0.9.3.01.001	Proyek : Pembinaan Kecamatan sumber dana Khusus. (Kantor PMD Kabupaten Belu)		80.000.000
2P.0.9.3.01.002.	Proyek : Pengembangan Kecamatan (PPK), sumber dana Umum (Kantor Bappeda Kabupaten Belu)		90.000.000
2P.0.9.3.01.003	Proyek : Dana Pendamping Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), sumber dana Umum. (Kantor Bappeda Kabupaten Belu)		114.000.000
2P.0.9.4.	SUB SEKTOR PEMUKIMAN	38.500.000	69.765.000
2P.0.9.4.01.	Program : Peningkatan/Pemukiman Penduduk.		69.765.000
2P.0.9.4.01.001	Proyek : Pembinaan ketentraman dan penertiban Penduduk, sumber dan PBB Sektor Pertambangan. (Bagian Trantib Setda Belu)		20.000.000
2P.0.9.4.01.002	Proyek : Penataan batas wilayah kecamatan dan Desa, sumber dana PBB Sektor Pertambangan (Bagian Tata Pemerintahan Setda Belu)		30.000.000
2P.0.9.4.01.003	Proyek : Penataan batas wilayah Kecamatan dan Desa sumber dana PBB sektor Pertambangan. (Bagian Tata Pemerintahan Setda Belu)		19.765.000
2P.0.10.	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	1.482.653.000	1.207.500.000
2P.0.10.1.	SUB SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP	1.482.653.000	1.207.500.000
2P.0.10.1.01.	Program : Pelestarian Alam dan Lingkungan Hidup.		1.207.500.000
2P.0.10.1.01.001	Proyek Bantuan Khusus Penghijauan sumber dana khusus. (Dinas PKT Kab. Belu)		797.500.000

KODE ANGGARAN	PROGRAM, PROYEK/SUB PROYEK.	ANGGARAN TAHUN YANG LALU	ANGGARAN TAHUN INI
2P.0.10.1.01.002	Proyek Penataan kelembagaan sumber dana umum. (Bagian Organisasi Setda Belu)		75.000.000
2P.0.10.1.01.003	Proyek : Penyehatan Lingkungan Permukiman Perkotaan, sumber dana khusus. (Bagian Lingkungan Hidup Setda Belu)		200.000.000
2P.0.10.1.01.004	Proyek : Penyusunan Neraca Kualitas Lingkungan Hidup (NKLHD) dan PPLH, sumber dana umum. (Bagian Lingkungan Hidup Setda Belu)		55.000.000
2P.0.10.1.01.005	Proyek : Penyusunan Propeda dan Penelitian Dampak Proyek – proyek Pembangunan, sumber dana Umum. (Kantor Bappeda Kabupaten Belu)		80.000.000
2P.0.11.	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA <u>PEMUDA DAN OLAH RAGA</u>	5.748.601.000	1.568.783.000
2P.0.11.1	<u>SUB SEKTOR PENDIDIKAN</u>	5.723.601.000	1.488.783.000
2P.0.11.1.01.	Program Peningkatan Pendidikan Sekolah Dasar (SD).		1.418.783.000
2P.0.11.1.01.001	Proyek : Pembangunan dan Revitalisasi SD dan MI, sumber dana khusus (Dinas PU Kab. Belu)		1.056.283.000
2P.0.11.1.01.002	Proyek : Peningkatan Pemantapan Kelembagaan (LKMD), Pembinaan Pembangunan Desa, Pembinaan Penanggulangan Pekerja Anak (P2ADT), Teknologi Tepat Guna dan Pembinaan LKMD, sumber dana umum. (Kantor PMD Kabupaten Belu)		195.000.000
2P.0.11.1.01.003	Proyek : Pengadaan Buku Raport SD, sumber dana PBB Sektor Pertambangan (Dinas P dan K Kabupaten Belu)		40.000.000
2P.0.11.1.01.004	Proyek: Rehabilitasi Asrama Belu, sumber dana Umum. (Dinas PU Kabupaten Belu)		60.000.000
2P.0.11.1.01.005	Proyek: Pengadaan Tenaga Guru DP3 sumber dana PBB sektor Pertambangan. (Dinas P dan K Kabupaten Belu)		67.500.000



KODE ANGGARAN	PROGRAM, PROYEK/SUB PROYEK.	ANGGARAN TAHUN YANG LALU	ANGGARAN TAHUN INI
2P.0.11.1.02.	Program : Pembinaan Pendidikan Menengah.		70.000.000
2P.0.11.1.02.001.	Proyek : Peningkatan SPK Daerah Atambua, sumber dana Umum. (Dinas Kesehatan Kabupaten Belu)		70.000.000
2P.0.11.4.	<u>SUB SEKTOR PEMUDA DAN OLAAHRAGA</u>	25.000.000	100.000.000
2P.0.11.4.01.	Program : Pembinaan dan Pengembangan Pemuda.		100.000.000
2P.0.11.4.01.001.	Proyek : Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan Mental Spiritual serta serta penanggulangan Bencana Alam, sumber dana Umum. (Bagian Sosial Setda Belu)		100.000.000
2P.0.12.	<u>SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA</u>		20.000.000
2P.0.12.1.	<u>SUB SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA</u>		20.000.000
2P.0.12.1.01.	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana		20.000.000
2P.0.12.1.01.001.	Proyek : Pencatatan dan Kutipan Akte sumber dana PBB Sektor Pedesaan / Perkotaan (Kantor Catatan Sipil Kab.Belu)		20.000.000
2P.0.13.	<u>SEKTOR KESEHATAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA</u>	1.266.984.000	351.911.000
2P.0.13.1.	<u>SUB SEKTOR KESEHATAN</u>	101.000.000	176.911.000
2P.0.13.1.02.	Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.		176.911.000
2P.0.13.1.02.001	Proyek : Pengadaan obat-obatan untuk Puskesmas, sumber dana Umum. (Dinas Kesehatan Kabupaten Belu)		35.000.000
2P.0.13.1.02.002	Proyek : Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit (OPRS), sumber dana Khusus (RSU Atambua)		111.911.000
2P.0.13.1.02.003	Proyek : Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit, sumber dana Umum (RSU Atambua)		30.000.000
2P.0.13.2.	<u>SUB SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL</u>	1.037.326.000	0

KODE ANGGARAN	PROGRAM, PROYEK/SUB PROYEK.	ANGGARAN TAHUN YANG LALU	ANGGARAN TAHUN INI
2P.0.13.3.	SUB SEKTOR PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	128.658.000	175.000.000
2P.0.13.3.02.	Program : Peranan Wanita Anak dan Remaja.		175.000.000
2P.0.13.3.02.001	Proyek : Pengembangan Kelangsungan Hidup, Perkembangan dan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA), sumber dana umum. (Kantor Bappeda)		175.000.000
2P.0.14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	2.250.000.000	312.000.000
2P.0.14.1.	SUB SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	2.250.000.000	312.000.000
2P.0.14.1.02.	Program : Perbaikan Perumahan dan Pemukiman.		312.000.000
2P.0.14.1.02.001	Proyek : Perbaikan Perumahan dan Permukiman Pedesaan, sumber dana Khusus (Dinas PU Kab. Belu).		312.000.000
2P.0.15	SEKTOR AGAMA.	0	0
2P.0.16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI.	347.571.000	292.637.875
2P.0.16.1	SUB SEKTOR PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI.	100.000.000	100.000.000
2P.0.16.1.01.001	Proyek : Peningkatan Penerangan Jalan dalam kota Atambua dan sekitarnya, sumber dana PBB Sektor Perkotaan (Bagian Perkerjasama--Setda Belu).	0	100.000.000
2P.0.16.3	SUB SEKTOR PENELITIAN.	247.571.000	192.637.875 ✓
2P.0.16.3.01.	Program : Pembinaan Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		192.637.875
2P.0.16.3.01.001.	Proyek Sistem Pendataan dan Pendaftaran Subyek Pajak, Pos dan Pemantau Galian C dan Rehab Los Pasar Baru, sumber dana umum. (Dispenda Kab. Belu)		100.000.000
2P.0.16.3.01.002.	Proyek Pengadaan Sound Sistem sumber dana PBB sektor Pertambangan (Bagian Umum Setda Belu).		20.000.000
2P.0.16.3.01.003	Proyek Manajemen Kepala Sekolah, sumber dana PBB sektor Pertambangan (Dinas P dan K Kabupaten Belu).		17.637.875

KODE ANGGARAN	PROGRAM, PROYEK/SUB PROYEK.	ANGGARAN TAHUN YANG LALU	ANGGARAN TAHUN INI
2P.0.16.3.01.004	Proyek Pembinaan Raker Pamong Praja, sumber dana PBB Sektor Pedesaan / Perkotaan (Bagian Tata Pem. Setda Belu)		30.000.000
2P.0.16.3.01.005	Proyek Pembebasan Tanah-tanah Dinas Pemda, sumber dana PBB sektor Perkotaan / Pedesaan (Bagian Tata Pemerintahan Setda Belu)		25.000.000
2P.0.17	<u>SEKTOR HUKUM</u>	45.000.000	100.000.000
2P.0.17.1	<u>SUB SEKTOR HUKUM</u>	45.000.000	100.000.000
2P.0.17.1.01.	Program : Hukum		100.000.000
2P.0.17.1.01.001	Proyek Pembinaan sarana dan pra-sarana hukum, sumber dana umum. (Bagian Hukum Setda Belu)		100.000.000
2P.0.18.	<u>SEKTOR APARATUR PEMERINTAH DAN PENGAWASAN</u>	2.594.631.000	2.105.047.125
2P.0.18.1.	<u>SUB SEKTOR APARATUR PEMERINTAH</u>	2.522.903.000	1.915.047.125
2P.0.18.1.01.	Program : Peningkatan Mutu Aparatur Pemerintah		470.000.125
2P.0.18.1.01.001.	Proyek : Penyelesaian Tunggakan Penertiban Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (Simduk) sumber dana PBB 10% Hak Pusat kepada Pemda Tk. II (Bagian Tata Pemerintahan Setda Belu).		208.000.125
2P.0.18.1.01.002	Proyek : Pengadaan Komputer Mloksdesk, Kendaraan roda empat dan roda dua untuk DPRD sumber dana umum (Bagian Perlengkapan Setda Belu)		120.000.000
2P.0.18.1.01.003	Proyek : Pembekalan ADPRD, sumber dana umum (Sekretariat DPRD Kab. Belu)		60.000.000
2P.0.18.1.01.004	Proyek : Pengadaan kendaraan roda empat sumber dana PBB Sektor Pertambangan (Bagian Perlengkapan Setda Belu).		84.000.000
2P.0.18.1.02.	Program : Prasarana Fisik Pamong Praja.		645.047.000
2P.0.18.1.02.001.	Proyek : Sensus Barang Milik Pemerintah, Sumber Dana PBB sektor Pertambangan. (Bagian Perlengkapan Setda Belu)		20.000.000
2P.0.18.1.02.002	Proyek Pembangunan Rumah Jabatan Sekwilda, sumber dana umum (Dinas PU Kab. Belu).		200.047.000

KODE ANGGARAN	PROGRAM, PROYEK/SUB PROYEK.	ANGGARAN TAHUN YANG LALU	ANGGARAN TAHUN INI
2P.0.18.1.02.003	Proyek Rehabilitasi Gedung DPRD, sumber dana umum (Bagian Perleng – kapan Setda Belu).		40.000.000
2P.0.18.1.02.004	Proyek : Rehabilitasi Kantor Bupati Baru, sektor Pertambangan (Bagian Perleng – kapan Setda Belu).		75.000.000
2P.0.18.1.02.005	Proyek Pembangunan lanjutan Kantor Bappeda, sumber dana umum (Dinas PU Kab. Belu).		250.000.000
2P.0.18.1.02.006	Proyek Pemeliharaan alat berat (Workshop), sumber dana PBB, Sektor Pertambangan (Dinas PU Kab. Belu).		20.000.000
2P.0.18.1.02.007	Proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pengolahan Data Elektronik, sumber dana PBB sektor Pertambangan (Kantor PDE Kabupaten Belu).		40.000.000
2P.0.18.1.03.	Program : Penertiban Aparatur Pemerintah		800.000.000
2P.0.18.1.03.001	Proyek : Peningkatan Pendayagunaan Aparatur Negara/Daerah, Sumber Dana Umum. (Bagian Kepegawaian Setda Belu).		550.000.000
2P.0.18.1.03.002	Proyek : Perencanaan Umum Pembangunan Dati II, Sumber Dana Umum (Kantor Bappeda Kab. Belu).		250.000.000
2P.0.18.2.	SUB SEKTOR PENDAYAGUNAAN SISTEM PELAKSANAAN PENGAWASAN	71.728.000	190.000.000
2P.0.18.2.01.	Program Pendayagunaan Sistem Dan Pelaksanaan Pengawasan		190.000.000
2P.0.18.2.01.001	Proyek : Peningkatan Pengawasan Fungsional, sumber dana umum (Kantor Itwilkab Belu).		90.000.000
2P.0.18.2.01.002	Proyek Peningkatan Pengawasan . sumber dana PBB sektor Pertambangan (Kantor Itwilkab Belu).		40.000.000
2P.0.18.2.01.003	Proyek Pengendalian dan Pembinaan Administrasi Proyek Dati II, Sumber Dana Umum (Bagian Penyusunan Program Setda Belu).		60.000.000

KODE ANGGARAN	PROGRAM, PROYEK/SUB PROYEK.	ANGGARAN TAHUN YANG LALU	ANGGARAN TAHUN INI
2P.0.19.	SEKTOR POLITIK PENERANGAN DAN MEDIA MASA	85.000.000	70.000.000
2P.0.19.1.	SUB SEKTOR POLITIK	85.000.000	70.000.000
2P.0.19.1.01.	Program : Pembinaan Politik Dalam Negeri.		70.000.000
2P.0.19.1.01.001	Proyek Pembinaan Politik Dalam Negeri, Sumber dana umum (Kantor Sosial Politik Kabupaten Belu).		70.000.000
2P.0.20.	SEKTOR KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM	140.000.000	50.000.000
2P.0.20.1.	SUB SEKTOR KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM	140.000.000	50.000.000
2P.0.20.1.01.	Program : Keamanan dan Keterliban Umum.		50.000.000
2P.0.20.1.01.001.	Proyek : Peningkatan Dan Pengembangan Pertahanan Sipil, sumber Dana Umum (Kantor Mawil Hansip 2004 Belu).		50.000.000

Lampiran IV

REKAPITULASI REALISASI FISIK KEUANGAN (RFK - 1)
PROYEK - PROYEK TAHUN ANGGARAN 2000

Bulan: Desember 2000

No.	Nama Proyek / Bagian Proyek	Dana (Rp)	Instansi Pengelola	Pimpro / Pimbagpro	Realisasi		Keterangan
					F	K	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DANA UMUM							
1	Pembinaan Petani Pemakai Alr (P3A)	35.000.000	Dinas Pertanian	Anton Ngere	100,00	100,00	
2	Peningkatan Produk Tanaman Pangan	85.000.000	Dinas Pertanian	Gabriel Ngasi	100,00	99,10	disetor kembali
3	Pengembangan Tanaman Perdagangan	85.000.000	Dinas Perkebunan	Gaspar Bria Seran	100,00	100,00	
4	Penanggulangan Penyakit Temak Besar - Sensus Temak dan Penyelesaian Rumah Potong Hewan (RPH)	115.000.000	Dinas Peternakan	Ir. Yeremias K. Taek	100,00	100,00	
5	Peningkatan Sarana Produksi Perikanan Laut dan Rehabilitasi Tambak Ikan Etuwain	100.000.000	Dinas Perikanan	Kali Andreas	100,00	100,00	
6	Pembuatan Saluran Irigasi	90.000.000	Dinas PU	Stef M. Superman	100,00	100,00	
7	Pembuatan Jalan Trotoar & Pembuatan Saluran dalam Kota Atambua dan Bronjong Kali Talau	150.000.000	Dinas PU	Blasius Besi Meta	100,00	100,00	
8	Rehabilitasi Asrama Belu	60.000.000	Dinas PU	Stef F. Ladjar	100,00	100,00	
9	Micdesk Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 untuk DPRD	120.000.000	Bagian Perlengkapan	Marsel Seran	100,00	100,00	
10	Pembangunan Lanjutan Kantor Bappeda	250.000.000	Dinas PU	Askian Isa	100,00	100,00	
11	Sistem Pendataan dan Pendaftaran Subyek Pajak, Pos Pemantau Galian C & Rehab Pos Pasar Baru	100.000.000	Dispenda Belu	Donatus Bere, SH	100,00	100,00	
12	Pembangunan Lanjutan Terminal AKAP (Pelataran), Rehab Terminal Kota & Pengadaan Rambu Lalu Lintas	270.000.000	Dinas LLAJ	Yohanes Suku	100,00	100,00	
13	Pengembangan Obyek Wisata di Kab. Belu & Pegelaran Budaya Timor	251.000.000	Dinas Pariwisata	Sifronius Asa	90,00	100,00	Dalam Proses Penyelesaian
14	Peningkatan SPK Daerah Atambua	70.000.000	Dinas Kesehatan	Ana Berkanis	100,00	100,00	
15	Pengadaan Obat-Obatan untuk Puskesmas	35.000.000	Dinas Kesehatan	Drs. Yeremias Taek	100,00	100,00	
16	Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit	30.000.000	RSUD Atambua	Yohanes Nepa Fay	100,00	100,00	
17	Revisi PJM P3KT dan Land Consolidation (LC)	120.000.000	Kantor Bappeda	Ir. Katherina F. Saik	100,00	100,00	
18	Program Pengembangan Kecamatan (PPK)	90.000.000	Kantor Bappeda	Verini C. Manek, S.Pt	100,00	100,00	
19	Penyusunan Properda dan Penelitian Dampak Proyek-Proyek Pembangunan	105.000.000	Kantor Bappeda	R. Th. J. Manek, S.Pt	100,00	100,00	
20	Perencanaan Umum Pembangunan Daerah Kabupaten	250.000.000	Kantor Bappeda	Drs. Hendrikus Mau	100,00	100,00	
21	Pengembangan Kelangsungan Hidup, Perkembangan dan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPIIA)	175.000.000	Kantor Bappeda	Mollo Gabriel	100,00	100,00	
22	Peningkatan, Pementapan Kelembagaan LKMD dan Program Peningkatan Penanggulangan Pekerja Anak (P2ADT)	195.000.000	Kantor PMD	Dra. M. K. Eda Fahik	100,00	100,00	
23	Pembinaan Politik Dalam Negeri	70.000.000	Kantor Sospol	Benediktus Mones	100,00	100,00	
24	Peningkatan Pengawasan Fungsional	90.000.000	Kantor Itwilkab	Drs. Petrus Hela Mau	100,00	100,00	
25	Peningkatan dan Pengembangan Pertahanan Sipil	50.000.000	Mawil Hansip	Nikolas Klau, B.Sc	100,00	100,00	
26	Pengembangan Administrasi Keuangan Daerah/Gaji	150.000.000	Bagian Keuangan	H.J. Letto	100,00	100,00	
27	Penyediaan Sarana Usaha	50.000.000	Bagian Perekonomian	Drs. Remigius Halek	100,00	100,00	

No.	Nama Proyek / Bagian Proyek	Dana (Rp)	Instansi Pengelola	Pimpro / Pimbagpro	Realisasi		Keterangan
					F	K	
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Pengembangan Industri dan Perdagangan	90.000.000	Bagian Perekonomian	Drs. Remigius Halek	100,00	100,00	
29	Penataan Kelembagaan	75.000.000	Bagian Organisasi	Daniel Kapitan, S.IP	100,00	100,00	
30	Penyusunan Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (NKLD) dan PPLH	74.000.000	Bagian Lingk. Hidup	Marselinus Nahak, ST	100,00	100,00	
31	Program Pembinaan Pemuda, Olah Raga dan Mental Spritual serta Penanggulungan Bencana Alam	100.000.000	Bagian Sosial	Yakobus Asa	100,00	100,00	
32	Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum	100.000.000	Bagian Hukum	Maria Lotu	100,00	100,00	
33	Rehabilitasi Gedung DPRD	40.000.000	Bagian Perlengkapan	Kehi Theodorus	100,00	100,00	
34	Pembekalan Anggota DPRD	60.000.000	Sekretariat DPRD	Drs. Vinsensius Kapu	100,00	100,00	
35	Peningkatan Pendayagunaan Aparatur Negara/Daerah	573.300.000	Bagian Kepegawalan	L. Stef Hale	100,00	100,00	
36	Pengendalian dan Pembinaan Administrasi Proyek Daerah	60.000.000	Bagian P. Program	Gaspar Klau	100,00	100,00	
37	Pembangunan Rumah Jabatan Sekda	220.747.000	Bagian Perlengkapan	Kehi Theodorus	100,00	100,00	
	Jumlah I dan r. %	4.584.047.000			100,00	99,08	
II. DANA KHUSUS							
A. Pembangunan Prasarana Umum							
1	Perhubungan dan Penanganan Jalan Kabupaten/Kota (PPJK)	3.400.000.000	Dinas PU	Paulus Lina	100,00	100,00	
2	Perbaikan Perumahan dan Permukiman Perdesaan	312.000.000	Dinas PU	P. Adoe Kadji	100,00	100,00	
3	Penyehatan Lingkungan Permukiman Perdesaan	136.000.000	Dinas PU	Kima Agustinus	100,00	100,00	
4	Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Perdesaan	424.000.000	Dinas PU	Gaudensius Wilik	100,00	100,00	
5	Penyehatan Lingkungan Permukiman Perkotaan	200.000.000	Dinas PU	Kima Agustinus	100,00	100,00	
6	Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Perkotaan	250.000.000	Dinas PU	Yohanes Tefa	100,00	100,00	
B. Pelayanan Sosial Ekonomi							
7	Pembangunan dan Revitalisasi SD/MI	1.056.283.000	Dinas PU	Mesakh Pollolesi	100,00	100,00	
8	Operasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	111.911.000	RSUD Atambua	Rosa G. Asa	100,00	100,00	
C. Peningkatan Produksi							
9	Penyuluhan Pertanian Lapangan (BPPL)	186.821.000	B I P P	Syahrir Pualapu, S.Pt	100,00	100,00	
10	Pemberdayan Penangkar Benih/Bibit Pertanian	88.000.000	Dinas Pertanian	Ir. Frido Siribein	100,00	100,00	
D. Penanganan Lingkungan Hidup							
11	Penghijauan	797.500.000	Dinas PKT	Gabriel J. Kono	100,00	100,00	

No.	Nama Proyek / Bagian Proyek	Dana (Rp)	Instansi Pengelola	Pimpro / Pimbagpro	Realisasi		Keterangan
					F	K	
1	2	3	4	5	6	7	8
	E. Pembinaan Daerah Bawahan & Masyarakat						
12	Pembinaan Kecamatan	80.000.000	Kantor PMD	Hendrikus Subani,	100,00	100,00	
	F. Pengembangan Wilayah & Masyarakat						
13	Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Sub Sektor Pertanian	1.102.370.000	Dinas Pertanian	Herman Klau	100,00	99,92	disetor kembali
14	Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Sub Sektor Perkebunan	817.634.500	Dinas Perkebunan	Marsel Fahik	100,00	100,00	
15	Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Sub Sektor Perikanan	663.073.650	Dinas Perikanan	Yohanes Seran, S.Pi	100,00	100,00	
16	Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Sub Sektor Peternakan	1.787.859.000	Dinas Peternakan	Ir. Alfons Manek	100,00	100,00	
17	Pembordayaan Ekonomi Rakyat Sub Sektor Perekonomian	529.062.850	Bagian Perekonomian	Drs. Remigius L. Halek	100,00	100,00	
18	Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman Masyarakat dan Pengungsi Timor Timur	5.710.000.000	Dinas PU	Mesak Pollolessi	100,00	100,00	
19	Pembinaan, Monitoring dan Sosialisasi	150.000.000	Kantor Bappeda	Verini C. Manek, S.Pt	100,00	100,00	
	Jumlah II dan r%	17.802.515.000			100,00	99,99	
	III. DANA JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS)						
1	Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)						
	Dana Non Pendamping						
	Rp. 1.738.747,-	1.738.747.000	PMD	Subani Hendrikus	98,23	99,79	Sesuai Tahun Ajaran
2	Dana Operasional dan Pemeliharaan SD/MI						
	Dana Non Pendamping						
	Rp. 644.843,-	644.843.000	Dinas P dan K	Edmundus Tae	100,00	100,00	
3	Dana Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas		Dinas Kesehatan	Anton Koy	100,00	100,00	
	Dana Non Pendamping						
	Rp. 542.178,-	542.178.000	Dinas Kesehatan	Anton Koy	100,00	100,00	
4	Pengembangan Kecamatan/PPK Pedesaan						
	Dana Non Pendamping						
	Rp.86.250,-	86.250.000	Bappeda	Verini C. Manek, S.Pt	100,00	100,00	
5	Proyek PDM-DKE 982.447.000						
	a. B O P	85.000.000	Bappeda	M. Baba	100,00	100,00	
	b. Bantuan Manajemen I	150.000.000	Bappeda	M. Baba	100,00	100,00	
	c. BLM	748.647.000	Bappeda	M. Baba	100,00	100,00	
6	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Di Daerah-PPW PEMD-PPW (NTAADP)						
	Dana Pendamping						
	dan PLN Mak 5675						
	Total Rp 2.650.000.000,-						
	a. Pembinaan dan Operasional	250.000.000	Bappeda	Drs. M. Baba	100,00	100,00	
	b. Bantuan IMS	2.627.000.000	Dinas Peternakan	Ir. Erens Wellem	83,33	83,33	Dalam Proses Penyelesaian
	Jumlah III dan r %	6.770.665.000			98,16	98,33	

No.	Nama Proyek / Bagian Proyek	Dana (Rp)	Instansi Pengelola	Plmpro / Plmbagpro	Realisasi		Keterangan
					F	K	
1	2	3	4	5	6	7	8
	IV. DANA PEMB. PROP.						
1	Operasional Pengairan (Bagian Proyek)	74.000.000	Dinas PU	Drs. M. Subani	100,00	100,00	
2	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Propinsi (Bagian Proyek)	119.911.000	Dinas PU	Lodwik Lobo	76,80	70,39	
3	Peningkatan Jalan Propinsi	878.988.000	Dinas PU	P. Usboko, ST	100,00	100,00	
4	Penataan Kota & Bangunan Kab. Belu & Lembata	110.000.000	Dinas PU Prop.	Ir. S. A. Nalo	100,00	100,00	
5	Bantuan Pengelolaan Kawasan Lindung	90.511.000	Dinas PKT	Metom Alexander	100,00	100,00	
6	Reboisasi	182.000.000	Dinas PKT	Lambertus Fernadez	100,00	100,00	
	Jumlah IV dan r %	1.455.408.000			96,13	95,07	
	V. APBD Kabupaten						
1	Peningkatan Penyuluhan Perkebunan	20.000.000	Dinas Perkebunan	Ir. Yustinus Nahak	80,00	77,50	
2	Pengembangan Produksi dan Produkt. Peternakan	37.500.000	Dinas Peternakan	Ir. Alfonsius Manek	100,00	100,00	
3	Pencacahan Ulang Ternak Pemerintah	45.000.000	Dinas Peternakan	Ir. Sato Marselinus	100,00	88,88	5.000.000 tidak terlayani
4	Pengadaan Pembibitan	25.000.000	Dinas PKT	R. Wadun	100,00	100,00	
5	Peningkatan Pers Radio	25.000.000	Bagian Humas	Mikhael Ati	80,00	73,60	
6	Pengadaan SSB	25.000.000	Bagian Umum	Bonaventura Eduk	100,00	100,00	
7	Pembinaan Ketenteraman dan Penertiban Penduduk	20.000.000	Bagian Trantlb	Arnold S. Moruk	100,00	100,00	
8	Penataan Batas Wilayah Kecamatan dan Desa	30.000.000	Bagian Tata Pem.	Alfonsius Kehi, S.IP	76,69	76,69	Dalam Proses Penyelesaian
9	Penataan Batas Wilayah Kecamatan dan Desa	19.765.000	Bagian Tata Pem.	Alfonsius Kehi, S.IP	100,00	100,00	
10	Pengadaan Buku Raport SD	40.000.000	Dinas P & K	John Leki Belle	100,00	100,00	
11	Pengadaan Tenaga Guru BP3	67.500.000	Dinas P & K	Arnoldus Bria, SmHk	100,00	100,00	
12	Pencatatan dan Penertiban Akte	20.000.000	Kantor Pencatatan Sipil	Marsianus Loe Mau, SH	100,00	100,00	
13	Peningkatan Penerangan Jalan dalam Kota Atambua dan sekitarnya	100.000.000	Bagian Perlengkapan	Marselinus Seran	100,00	100,00	
14	Pengadaan Sound Sistem	30.000.000	Bagian Umum	Ulu Kornelis	100,00	100,00	
15	Manajemen Umum Kepala Sekolah	17.637.875	Dinas P & K	Arnoldus Bria, SmHk	100,00	100,00	
16	Pembinaan Raker Pamong Praja	30.000.000	Bagian Tatapem	Alfonsus Kehi, SIP	100,00	100,00	
17	Pembebasan Tanah-tanah Pemda	25.000.000	Bagian Tatapem	Petrus Djita, SIP	100,00	100,00	
18	Penyusunan Pertanggungjawaban Bupati	19.765.000	Bagian Tatapem	Petrus Djita, SIP	100,00	100,00	
19	Penyelesaian Tunggakan Penertiban Sistem Informasi Manajemen Kependudukan	126.000.125	Bagian Tatapem	Alfonsus Kehi, SIP	100,00	100,00	
20	Pengadaan Kendaraan Roda Empat	84.000.000	Bagian Perlengkapan	Marselinus Seran	100,00	100,00	
21	Sensus Barang Milik Pemda	20.000.000	Bagian Perlengkapan	Marselinus Seran	100,00	100,00	
22	Rehab Kantor Bupati Baru	75.000.000	Bagian Perlengkapan	Kehi Theodorus	100,00	100,00	
23	Pemeliharaan Alat Berat	20.000.000	Dinas PU	Andrada Vinsen	100,00	100,00	
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor PDE	40.000.000	Kantor PDE	Drs. Laurensius Nahak	100,00	100,00	
25	Penyertaan Modal Pemda kepada BPD	10.000.000	Bagian Keuangan	Dominikus Mali, B.Sc	100,00	100,00	
26	Penyertaan Modal Pemda kepada PD Belu Bhakti	20.000.000	Bagian Keuangan	Dominikus Mali, B.Sc	100,00	100,00	
	Jumlah V dan r %	992.168.000			97,47	96,20	

No.	Nama Proyek / Bagian Proyek	Dana (Rp)	Instansi Pengelola	Pimpro / Pimbagpro	Realisasi		Keterangan
					F	K	
1	2	3	4	5	6	7	8
	VI. DANA KHUSUS PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN						
1	Bantuan langsung Desa/Kelurahan	1.494.000.000	Kantor PMD	Fransiskus Seran	100,00	100,00	
2	Bantuan Operasional Pembinaan (BOP) DPD/K untuk Kecamatan	89.050.000	Kantor PMD	Fransiskus Seran	100,00	100,00	
3	Bantuan Operasional Pembinaan (BOP) DPD/K untuk Kabupaten	19.000.000	Kantor PMD	Fransiskus Seran	100,00	100,00	
	Jumlah VI dan r%	1.602.050.000			100,00	100,00	
	VII. DANA BANTUAN BANTUAN LUAR NEGERI						
	Sumber Dana Loan KFN Jerman (Peralatan Medis)	7.000.000.000	RSUD Atambua	Ati Bere Gabriel	100,00	100,00	
1	Sumber Dana Loan IBRD						
	Dana Pendamping APBN (GOI)						
	Proyek Operasional IMS-NTAADP (Lanjutan) 1999/2000	970.948.000	Dinas Peternakan	Ir. Erens Wellem	100,00	100,00	
2	Pembangunan Jaringan Utama dan Tersier Irigasi	36.645.972.000	Dinas PU	Ir. Daniel Sukan	44,36	38,36	
	Jumlah VII dan r%	44.616.918.000			81,45	79,45	
	Jumlah I s/d VII dan r%	77.823.771.000			93,17	95,57	

Atambua, 5 Januari 2001
a.n. Kepala Bagian Penyusunan Program
Setda Kabupaten Belu
Kasubag. Pengendalian


Gasper Klau
NIP: 010 058 259

REKAPITULASI USULAN PROYEK TA. 2000/2001
Menurut Sektor Pembangunan

KABUPATEN : DAERAH TINGKAT II BELU

A. BIDANG : EKONOMI

No	Sektor	Jumlah Proyek	Sumber Biaya (Rp. 000)					Jumlah
			APBD II	APBD I	APBN	BLN	Swasta	
1	Industri	15	30,000	-	1,735,000	-	-	1,765,000
2	Pertanian dan Kehutanan	72	340,000	815,000	35,129,500	4,000,000	-	40,284,500
3	Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi	10	50,000	500,000	1,850,000	500,000	-	2,900,000
4	Pertambangan dan Energi	2	-	-	5,000,000	-	-	5,000,000
Jumlah		99	420,000	1,315,000	43,714,500	4,500,000	-	49,949,500

Atambua, 31 Agustus 1999
 Ketua Bappeda Tingkat II Belu

Dr. Joachim Lopez
NIP. 620 010 252

REKAPITULASI USULAN PROYEK TA. 2000/2001
Menurut Sektor Pembangunan

Kabupaten : Daerah Tingkat II Belu

B. BIDANG : FISIK PRASARANA

No	Sektor	Jumlah Proyek	Sumber Biaya (Rp. 000)					Jumlah
			APBD II	APBD I	APBN	BLN	Swasta	
1	Pengairan	16	0	150,000	16,665,000	0	0	16,815,000
2	Transportasi, Meteorologi dan Geofisika	61	1,565,000	1,396,970	15,232,280	0	0	18,194,250
3	Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	16	800,000	0	200,000	0	0	1,000,000
4	Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	24	2,660,000	1,355,000	4,195,000	0	0	8,210,000
5	Perumahan dan Permukiman	14	10,615,000	0	0	0	0	10,615,000
6	Pertambangan dan Energi	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	131	15,640,000	2,901,970	36,292,280	0	0	54,834,250

Atambua, 31 Agustus 1999
Ketua Bappeda Tingkat II Belu,

Drs. Joachim Lopez
NIP. 620 010 252

REKAPITULASI USULAN PROYEK TA. 2000/2001
Menurut Sektor Pembangunan

Kabupaten Daerah Tingkat II Belu

C. BIDANG : SOSIAL BUDAYA

No	Sektor	Jumlah Proyek	Sumber Biaya (Rp. 000)					Jumlah
			APBD II	APBD I	APBN	BLN	Swasta	
1	Tenaga Kerja	9	242,800	96,000	245,000	0	0	583,800
2	Pendidikan	116	50,000	270,000	14,320,000	0	0	14,640,000
3	Kependudukan 2 KS	2	0	0	400,000	0	0	400,000
4	Kesehatan	93	0	0	10,892,712	0	0	10,892,712
5	Perumahan	4	0	0	2,050,000	0	0	2,050,000
6	Agama	19	0	0	6,045,000	0	0	6,045,000
7	IPTEK	9	0	0	785,000	0	0	785,000
8	Hukum	15	0	0	876,350	0	0	876,350
9	Aparatur Negara & Pengawasan	28	1,420,000	0	4,555,000	0	0	5,975,000
10	Politik	2	84,000	0	0	0	0	84,000
11	Pertahanan & Keamanan Nasional	9	0	574,000	1,000,000	0	0	1,574,000
Jumlah		306	1,796,800	940,000	41,169,062	0	0	43,905,862

Atambua, 31 Agustus 1999

M. Ketua Bappeda Tingkat II Belu

Drs. Joachim Lopez
NIP. 620 010 252

PEMERINTAH KABUPATEN BELU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
JALAN EL TARI NO 1 TELEPON NO. 21152
ATAMBUA

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 60 / 04 / III / BKBPM/BL-2001

Kepada

- Yth. 1. Kepala Bappeda Kab. Belu
2. Kepala Dispenda Kab. Belu
3. Kepala Kantor BPS Kab. Belu
4. Kepala Bagian Keuangan Setda Belu
5. Kepala Bagian Pembangunan Setda Belu

Masing – masing di Atambua

Dengan hormat,

Berdasarkan surat pemberitahuan Dekan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Nomor : 304/FBI/FE/III/01 tanggal , 23 Maret 2001, maka Bupati Belu memberikan ijin kepada :

Nama : Wilprima Maria F. Seran
Alamat : Universitas Sanata Dharma
Pekerjaan : Mahasiswa [Program S1]
Kebangsaan : Indonesia

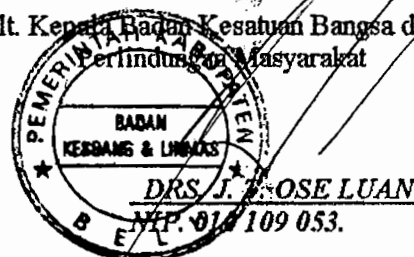
Untuk melakukan kegiatan Penelitian di Kantor/wilayah saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul
PENERAPAN AKUNTANSI DANA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bidang : Ekonomi
Lokasi : Kabupaten Belu .
Lamanya : 2 Bulan (terhitung mulai saat pemberitahuan ini di keluarkan).-

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati peraturan dan tata tertib di Daerah setempat dan menyampaikan laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Belu Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Belu.-

Atambua, 4 April 2001

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat



Tembusan :

1. Gubernur NTT, di Kupang;
2. Bupati Belu di Atambua. sebagai laporan;
- ③ Dekan FE. Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta ;
4. Yang bersangkutan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wilprima Maria Fatima Seran
Umur : 21 Tahun
Tempat/Tanggal Lahir: Belu, 03 Oktober 1980
Agama : Katolik
Alamat : Fatubena, RT 012/RW 004 Kec. Kota Atambua Belu-NTT
Pendidikan :
• 1985 - 1991 : SDI Debubot - Atambua
• 1991 - 1994 : SMP Negeri Sadi - Atambua
• 1994 - 1997 : SMA Negeri I - Atambua
• 1997 - 2001 : Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 03 Oktober 2001

Saya yang bersangkutan,

(Wilprima Maria Fatima Seran)

